



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5763 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

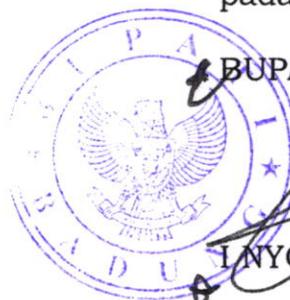
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 September 2017



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	5
2.2 Sumber Daya Bappeda	10
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	43
4.2 Strategi dan Kebijakan	45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Badung	11
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Badung	12
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Badung	14
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Badung	15
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Badung	44
Tabel 4.2 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	46
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Bappeda Kabupaten Badung.....	49
Tabel 5.2 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Badung	58
Tabel 5.3 Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Bappeda Kabupaten Badung	65
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	71

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5763 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Bappeda
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

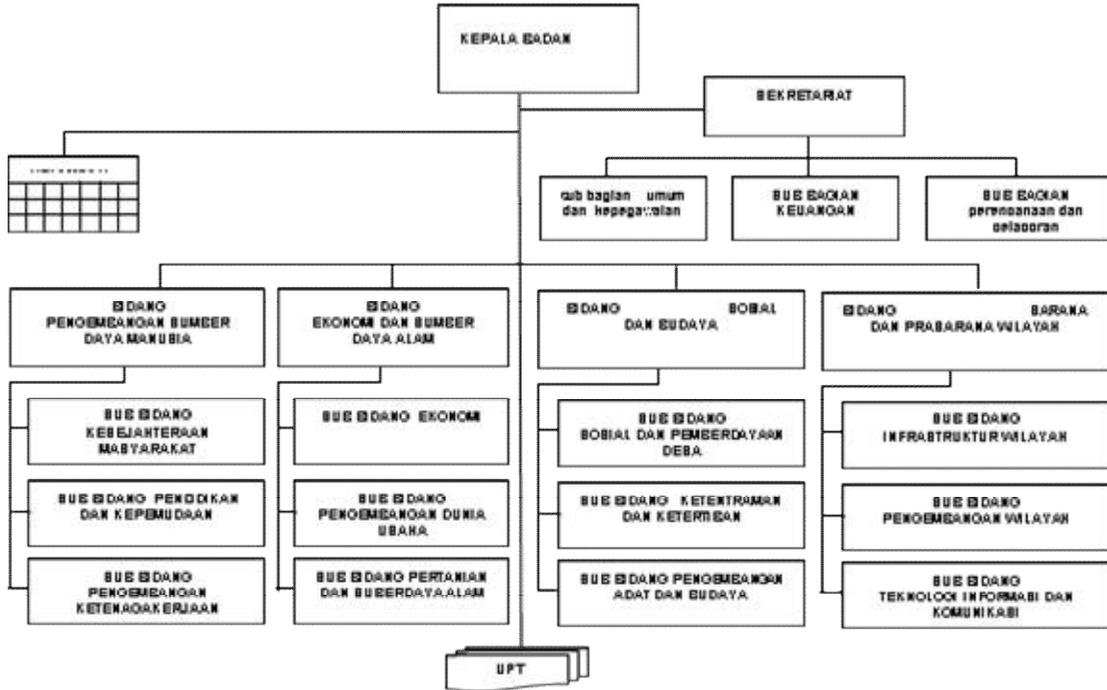
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan susunan organisasi Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Sub Bidang Pertanian Dan Sumber daya Alam;
- e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Desa;
 - b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Adat dan Budaya;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - c. Sub Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana kerja Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral;
- 6) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja termasuk program dari pemerintah atasan;
- 7) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- 8) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 9) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 10) Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian targettarget kinerja program;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik daerah dan pelaporan;
 - 3) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan;
 - 6) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 8) Mengkoordinasikan penyiapan laporan materi evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, pemuda olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, kepegawaian dan sekretariat daerah;

- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, perikanan dan energi sumber daya mineral;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Sosial Dan Budaya;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);

- 11) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja dan program;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat perencana yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Bappeda.

Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP		SD
1	Kepala Bappeda		1			1				1							1
2	Sekretaris Bappeda			1		1				1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1					1							1
	b Kasubag. Keuangan				1						1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1						1						1
	d Staf					18	8	3	1	15		1	9	2	1		29
3	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia			1		1				1							1
	a Kasubid. Kesejahteraan Masyarakat				1					1							1
	b Kasubid. Pendidikan dan Kepemudaan				1	1				1							1
	c Kasubid. Pengembangan Ketenagakerjaan				1	1				1							1
	d Staf					7	2		2	5			2				9
4	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam			1		1				1							1
	a Kasubid Ekonomi				1	1				1							1
	b Kasubid Pengembangan Dunia Usaha				1	1				1							1
	c Pertanian Dan Suberdaya Alam				1	1				1							1
	d Staf					8	1			7			2				9
5	Kabid Sosial dan Budaya			1		1				1							1
	a Kasubid. Sosial dan Pemberdayaan Desa				1		1			1							1
	b Kasubid. Ketentraman dan Ketertiban				1		1			1							1
	c Kasubid. Pengembangan Adat dan Budaya				1		1			1							1
	d Staf					7	2		2	5			2				9
6	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah			1		1				1							1
	a Kasubid. Infrastruktur Wilayah				1		1			1							1
	b Kasubid. Pengembangan Wilayah				1		1			1							1
	c Kasubid. Teknologi Informasi Dan Komunikasi				1		1			1							1
	d Staf					8	1		1	7			1				9
	Jumlah	0	1	5	15	11	58	14	3	21	45	0	1	16	2	1	86

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Bappeda telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Bappeda ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mobil Station Wagon	9	X		
2	Sepeda Motor	31	X		
3	Global Positioning System	5	X		
4	Scanner	2	X		
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	X		
6	Mesin Ketik Elektronik	1	X		
7	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	X		
8	Lemari Besi	2	X		
9	Rak Kayu	16	X		
10	Filling Besi/Metal	6	X		
11	Band Kas	5	X		
12	Lemari kayu	11	X		
13	Alat Penghancur Kertas	4	X		
14	Papan Nama Instansi	1	X		
15	Papan Pengumuman	4	X		
16	White Board	1	X		
17	Mesin Absensi	1	X		
18	Overhead Projektor	1	X		
19	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	X		
20	Lemari Kayu	3	X		
21	Rak Kayu	12	X		
22	Meja Kayu/Rotan	6	X		
23	Meja Rapat	58	X		
24	Meja Telpon	1	X		
25	Meja Podium	1	X		
26	Kursi Rapat	49	X		
27	Kursi Putar	44	X		
28	Meja Komputer	4	X		
29	Meja Piket	1	X		
30	Sofa	1	X		
31	Lemari Pakaian	4	X		
32	Lemari Rias	1	X		
33	MOUBILER LAINNYA	13	X		
34	Jam Elektronik	2	X		
35	Alat Pembersih Lain-lain	2	X		
36	AC Split	3	X		
37	Alat Dapur Lain-lain	1	X		
38	Televisi	11	X		
39	Sound System	4	X		
40	Wireless	1	X		
41	Unit Power Supply	2	X		
42	Camera Video	1	X		
43	Camera Film	11	X		
44	Dispenser	6	X		
45	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	X		
46	Local Area Network (LAN)	1	X		
47	P.C Unit	50	X		
48	Lap Top	29	X		
49	Note Book	34	X		

50	Storage Modul Disk	1	X		
51	Monitor	9	X		
52	Printer	55	X		
53	Scanner	1	X		
54	External	9	X		
55	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	X		
56	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	X		
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	X		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	X		
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	X		
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	X		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	X		
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	X		
63	Buffet Kayu	1	X		
64	Proyektor + Attachment	14	X		
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	X		
66	Camera Film	3	X		
67	Vertical Motorized Flim Rewinder	4	X		
68	Mesin Jilid	8	X		
69	Telephone (PABX)	1	X		
70	Pesawat Telephone	2	X		
71	Facsimile	3	X		
72	Personal Komputer	1	X		

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2005-2016 Bappeda Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Disamping itu pula sebagai Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
- b. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- c. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- d. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Perencanaan Pembangunan																		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	17.379.372	21.470.905	20.615.144	20.066.011	23.950.236	14.535.993	17.294.202	17.998.356	18.061.035	20.199.351	83,64	80,55	87,31	90,01	84,34	1.642.716	5.663.359
Belanja Aparatur	12.963.656	12.969.856	13.910.757	13.402.710	15.472.544	10.150.067	10.150.067	12.210.726	12.548.509	13.235.190	78,30	78,26	87,78	93,63	85,54	627.222	3.085.123
Belanja Tidak Langsung	9.541.168	11.612.818	12.019.346	12.343.570	14.591.658	7.955.903	8.930.910	10.548.106	11.655.930	12.506.898	83,38	76,91	87,76	94,43	85,71	1.262.622	4.550.995
Belanja Langsung	7.838.204	9.858.087	8.595.799	7.722.441	9.358.579	6.580.090	8.363.292	7.450.250	6.405.105	7.692.454	83,95	84,84	86,67	82,94	82,20	380.094	1.112.364
Total Belanja Daerah	17.379.372	21.470.905	20.615.144	20.066.011	23.950.236	14.535.993	17.294.202	17.998.356	18.061.035	20.199.351	83,64	80,55	87,31	90,01	84,34	1.642.716	5.663.359

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Keberhasilan Bappeda Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung yaitu :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Pengembangan pembiayaan pembangunan daerah yang tidak lagi bertumpu pada pemerintah melainkan adanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Peningkatan kualitas SDM perencana yang mampu dan cepat, baik dalam pengelolaan pembangunan maupun dukungan perangkat jaringan informasi pembangunan yang memadai.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *trend* peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun akan semakin meningkat pula ketersediaan dana pembangunan daerah.
- b. Dengan adanya pengembangan desentralisasi pembangunan mengakibatkan terjadinya pergeseran kegiatan pembangunan ke daerah, sehingga segala aktivitas perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan pembangunan dialihkan ke daerah.
- c. Semakin intensifnya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maka Bappeda sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat segera menjabarkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Badung. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Badung.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Bappeda memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Bappeda Kabupaten Badung.

Permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Badung antara lain :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang perencanaan.
2. Belum sempurnanya basis data pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya.
3. Belum maksimalnya penelitian dan pengembangan yang dapat menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Masalah eksternal yang dihadapi Bappeda Kabupaten Badung adalah :

1. Belum optimalnya perencanaan yang bersifat partisipatif dimana idealnya proses perencanaan yang baik sangat memerlukan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan sektor di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan SDM perencanaan, pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;

- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
4. Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1. Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1. Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1. Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan akomodasi wisata
11. Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1. Pengembangan permukiman 2. Pembangunan jalan
13. Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1. Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitar-nya
13. Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

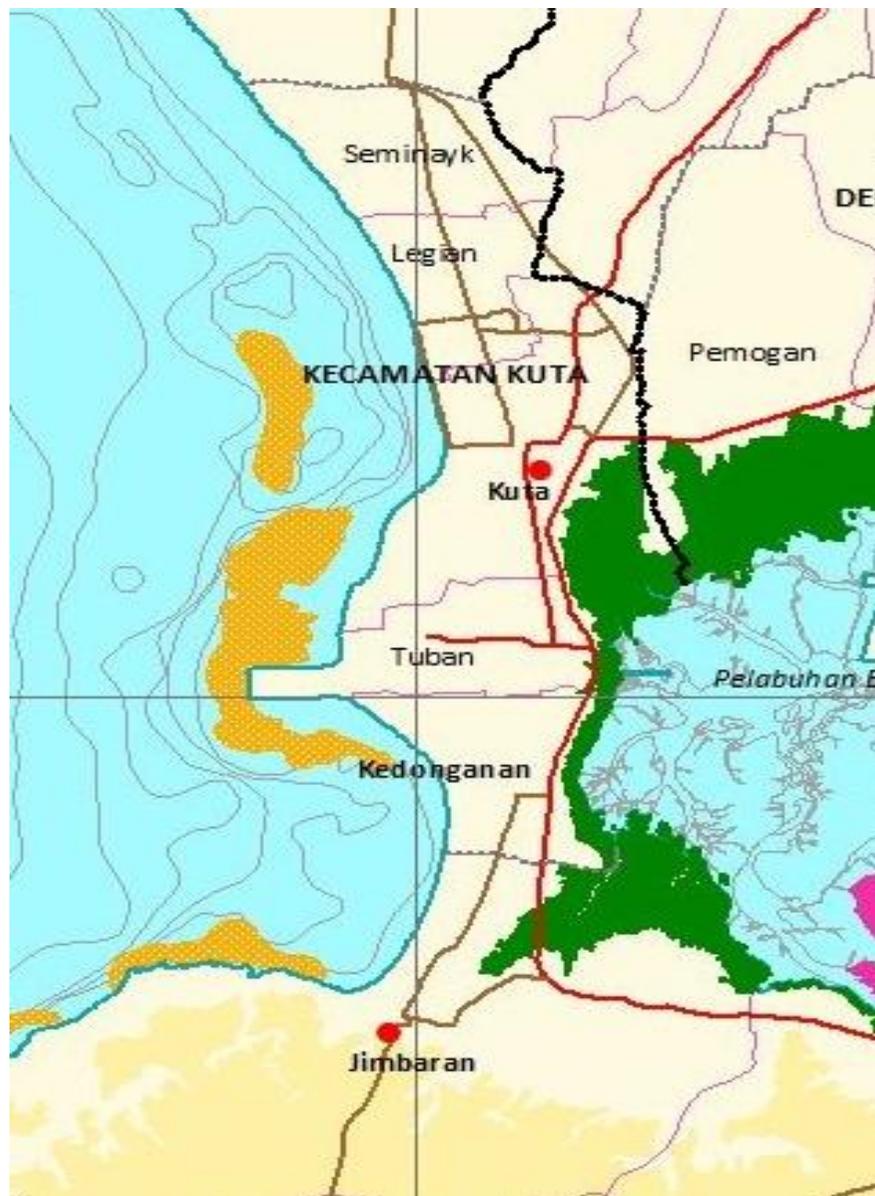
Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.
2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 		

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

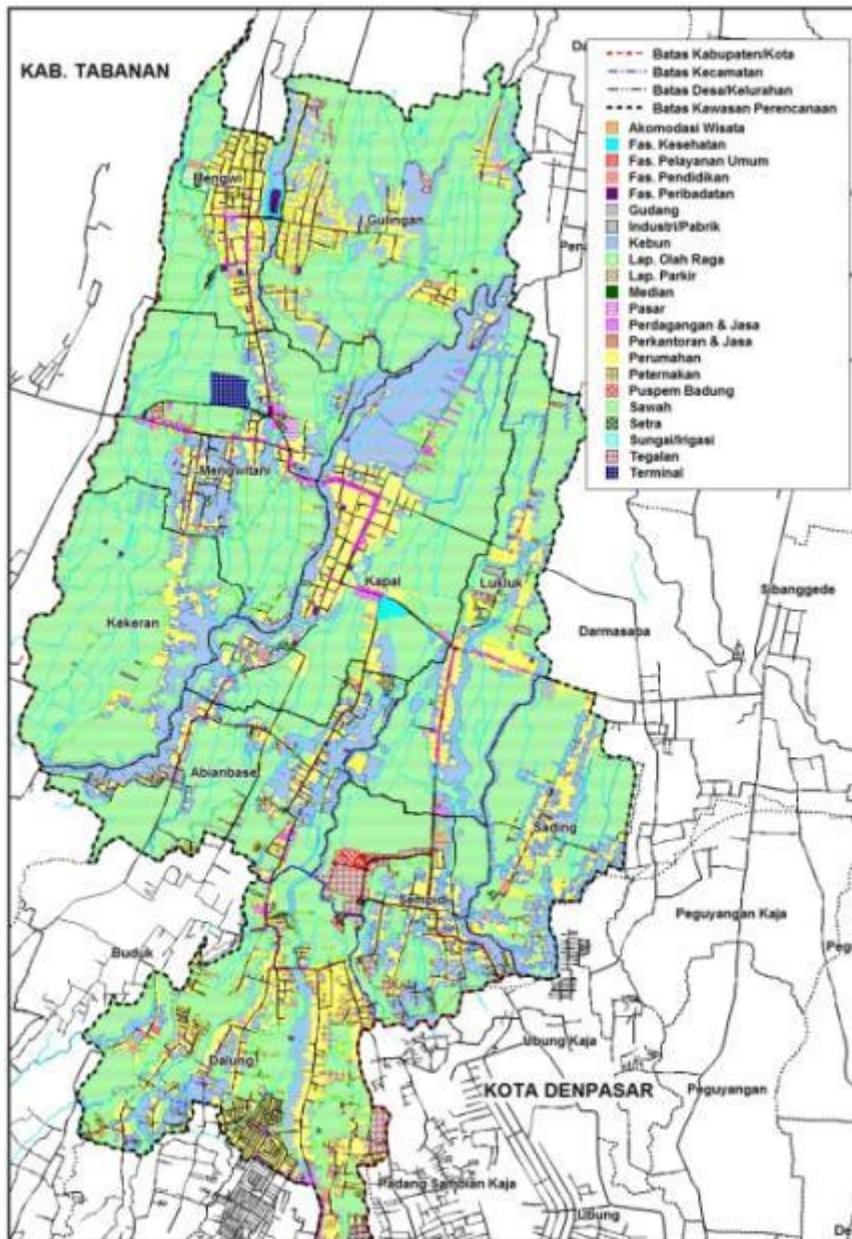
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.

	4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	
--	--	--

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintahan dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir.
2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. 		

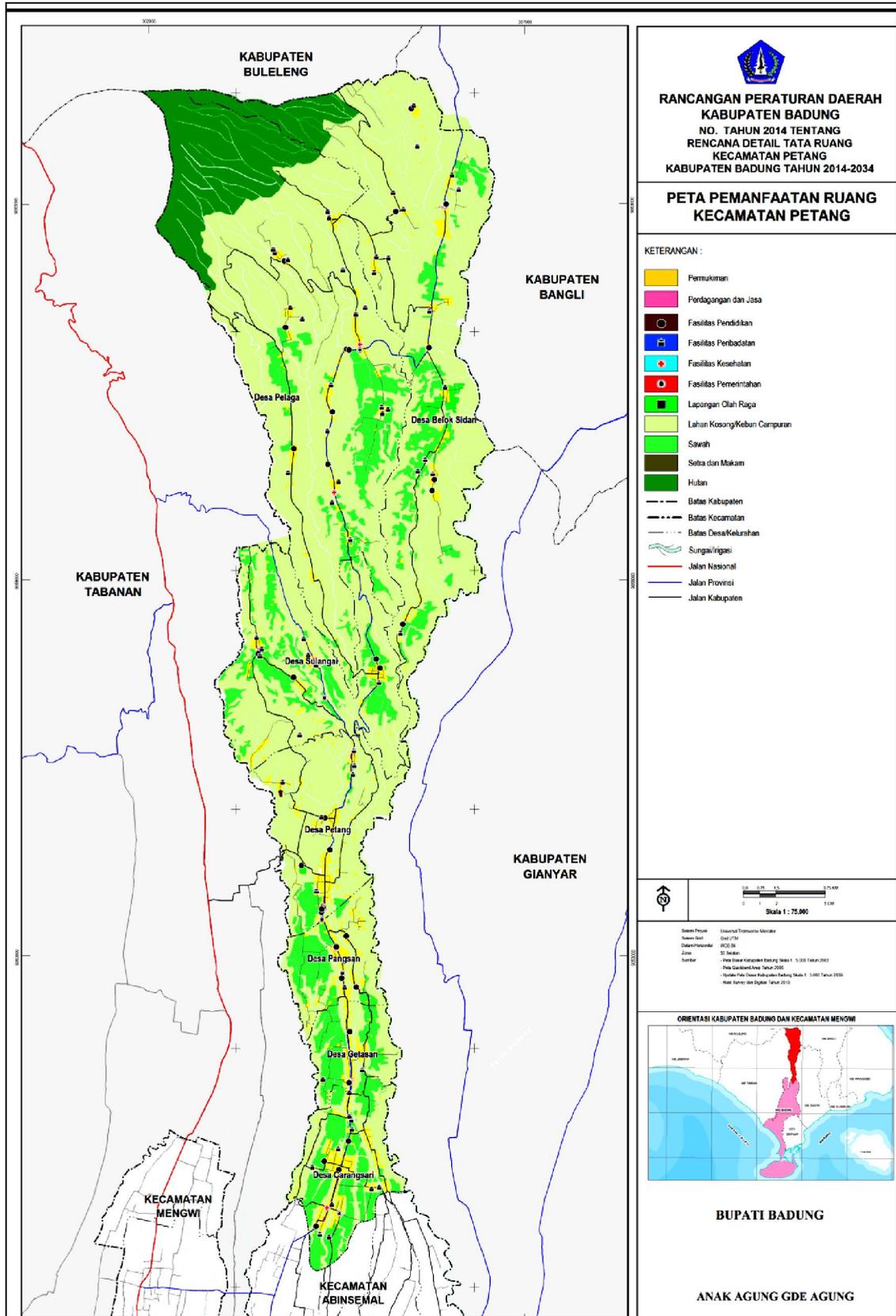
Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Cangu - Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan -Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Masalah Sampah		
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 		

2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah		
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).

Pengaruh kumulatif
<p>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</p>

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan kawasan industri khusus

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. Penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p>	<p>3. Mendorong kepatuhan/ke taatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p>		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p>	<p>1. Penetapan sawah abadi.</p> <p>2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p>	<p>1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</p>	<p>Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.</p>
3	Pengembangan Agropolitan	<p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p> <p>2. Dampak terhadap</p>	<p>1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p> <p>2. penerapan</p>	<p>1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona</p>	<p>Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif</p>	<p>teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3.penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4.integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2.pengembangan pertanian organik</p>	<p>iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p>
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p>	<p>1.Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.</p>	<p>1.Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.</p>	<p>Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung</p>
5	Pengembangan Kawasan Industri	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p>	<p>1.penetapan kawasan industri khusus</p>	<p>Penetapan kawasan industry khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.		kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Tujuan :

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Sasaran :

Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.

c. Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

d. Tujuan :

Menurunnya angka kemiskinan.

Sasaran :

Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.

e. Tujuan :

Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas.

Sasaran :

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	96%	97%	98%	99%
			b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	90%	91%	92%	93%	95%
		b. Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	92%	93%	94%	95%
			b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah <i>stakeholders</i> yang menyampaikan usulan kegiatan	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak
			b. Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	85%	85%	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	98%	99%
			b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	98%	99%
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	85%	86%	87%	88%	90%
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	90%	91%	92%	93%	95%

4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

- 1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

b. Strategi :

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat).

c. Strategi :

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.
- 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah.
- 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan.
- 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).

d. Strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2021

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	95%	a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	
			b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD			
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Persentase usulan kegiatan yang diserap dalam RKPD	85%	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	Memberikan kesempatan yang proporsional kepada stakeholders dalam penyampaian aspirasinya	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	97%	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kerjanya 100% keatas	Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan <i>stakeholders</i>	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
4 Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	2,05-2,00%	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	100%	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur dan Pengembangan wilayah	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- f. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Bappeda Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta						
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.829,51		14.144,48		15.639,12		15.520,76		17.529,93		75.663,80	Bappeda	Kabupaten Badung				
				01 FUNGSI PERENCANAAN			12.829,51		14.144,48		15.639,12		15.520,76		17.529,93		75.663,80	Bappeda	Kabupaten Badung					
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	100%	100%	887,01	100%	1.243,63	100%	1.322,48	100%	1.454,73	100%	1.600,20	100%	1.600,20	100%	6.508,06	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Kegiatan :																				
				08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKPd Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	319,40	120 buku	409,16	146 Buku	464,57	146 Buku	511,03	146 Buku	562,13	730 buku	2.266,29	Bappeda	Kabupaten Badung			
				24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 kali	1 Dokumen	97,74	1 Dokumen	152,07	1 Dokumen	118,27	1 Dokumen	130,09	1 Dokumen	143,10	5 Dokumen	641,28	Bappeda	Kabupaten Badung			
				35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perubahan RKPd Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	165,76	120 buku	198,92	146 Buku	200,58	146 Buku	220,63	146 Buku	242,70	730 buku	1.028,59	Bappeda	Kabupaten Badung			
				41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	1 laporan	15,67	1 laporan	10,65	1 laporan	18,96	1 laporan	20,86	1 laporan	22,94	5 laporan	89,08	Bappeda	Kabupaten Badung			
				45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	71,07	1 Jenis Dokumen	157,21	1 Jenis Dokumen	172,93	1 Jenis Dokumen	190,22	1 Jenis Dokumen	209,24	5 Jenis Dokumen	800,66	Bappeda	Kabupaten Badung			
				46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	152,32	1 Jenis Dokumen	167,55	1 Jenis Dokumen	184,31	1 Jenis Dokumen	202,74	1 Jenis Dokumen	223,01	5 Jenis Dokumen	929,93	Bappeda	Kabupaten Badung			
				47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	47,72	1 Jenis Dokumen	115,45	1 Jenis Dokumen	127,00	1 Jenis Dokumen	139,69	1 Jenis Dokumen	153,66	5 Jenis Dokumen	583,52	Bappeda	Kabupaten Badung			
				48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	17,33	1 Jenis Dokumen	32,62	1 Jenis Dokumen	35,88	1 Jenis Dokumen	39,47	1 Jenis Dokumen	43,41	5 Jenis Dokumen	168,71	Bappeda	Kabupaten Badung			
				01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	75%	75%	1.979,16	75%	1.968,81	76%	2.121,77	77%	2.295,54	78%	2.492,18	80%	10.857,46	Bappeda	Kabupaten Badung			
				Kegiatan :																				
01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	3 jenis benda pos	3 jenis benda pos	8,22	3 jenis benda pos	8,22	3 jenis benda pos	9,04	3 jenis benda pos	9,95	3 jenis benda pos	10,94	3 jenis benda pos	46,37	Bappeda	Kabupaten Badung							
02	Penyediaan jasa komunikasi, daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	2 jenis jasa komunikasi	2 jenis jasa komunikasi	426,79	2 jenis jasa komunikasi	426,79	2 jenis jasa komunikasi	469,46	2 jenis jasa komunikasi	516,41	2 jenis jasa komunikasi	568,05	2 jenis jasa komunikasi	2.407,50	Bappeda	Kabupaten Badung							
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	37 Unit	36 Unit	21,10	36 Unit	18,10	36 Unit	19,91	36 Unit	21,90	36 Unit	24,09	36 Unit	105,10	Bappeda	Kabupaten Badung							
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	28 jenis alat tulis kantor	28 jenis alat tulis kantor	39,82	28 jenis alat tulis kantor	44,86	28 jenis alat tulis kantor	49,35	28 jenis alat tulis kantor	54,28	28 jenis alat tulis kantor	59,71	28 jenis alat tulis kantor	248,03	Bappeda	Kabupaten Badung							
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya pengadaan	35 jenis cetakan	35 jenis cetakan	104,40	35 jenis cetakan	101,86	35 jenis cetakan	112,04	35 jenis cetakan	123,25	35 jenis cetakan	135,57	35 jenis cetakan	577,12	Bappeda	Kabupaten Badung							
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	15,86	1 paket	15,17	1 paket	16,69	1 paket	18,36	1 paket	20,20	1 paket	86,28	Bappeda	Kabupaten Badung							
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga kantor	11 jenis alat RT	11 jenis alat RT	5,78	11 jenis alat RT	11,30	11 jenis alat RT	12,43	11 jenis alat RT	13,68	11 jenis alat RT	15,04	11 jenis alat RT	58,23	Bappeda	Kabupaten Badung							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	70.83	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79.11	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	87.02	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	95.72	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	105.30	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	437.98	Bappeda	Kabupaten Badung
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	9 jenis konsumsi	9 jenis konsumsi	33.00	9 jenis konsumsi	57.88	9 jenis konsumsi	63.66	9 jenis konsumsi	70.03	9 jenis konsumsi	77.03	9 jenis konsumsi	301.60	Bappeda	Kabupaten Badung
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah	1 Paket	1 Paket	600,00	1 Paket	600,00	1 Paket	660,00	1 Paket	726,00	1 Paket	798,60	1 Paket	3.384,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Tersedianya bahan/sarana lomba raga dan kesenian	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	17,50	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	53,50	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	58,85	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	64,74	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	71,21	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	265,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya bahan upakara keagamaan	13 jenis sarana upakara	13 jenis sarana upakara	28,85	13 jenis sarana upakara	31,40	13 jenis sarana upakara	34,54	13 jenis sarana upakara	37,99	13 jenis sarana upakara	41,79	13 jenis sarana upakara	174,57	Bappeda	Kabupaten Badung
				25	Pelaksanaan Upakara Pengantaran Pura-Pura Kahyanan Jagat	Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	2 pura	2 pura	40,00	2 pura	131,50	2 pura	144,65	2 pura	159,12	2 pura	175,03	2 pura	650,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				26	Penyediaan bahan dekorasi	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	-	-	-	6 jenis bahan dekorasi	5,00	-	-	-	-	6 jenis bahan dekorasi	5,50	6 jenis bahan dekorasi	10,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	30084 Liter	32181 Liter	337,49	34920 Liter	384,12	167436 liter	1.873,97	Bappeda	Kabupaten Badung						
				28	Pencelenggaraan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	-	1 paket	229,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	229,52	Bappeda	Kabupaten Badung
				02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1 paket	1.116,52	1 paket	1.105,93	1 paket	1.172,52	1 paket	1.289,77	1 paket	1.418,75	1 paket	6.103,48	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dinas/Operasional	-	1 unit	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	19,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				7	Pengadaan perlengkapan kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	-	9 jenis perlengkapan kantor	105,64	4 jenis perlengkapan kantor	40,00	-	-	-	-	-	-	9 jenis perlengkapan kantor	145,64	Bappeda	Kabupaten Badung
				09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	11 jenis peralatan kantor	11 jenis peralatan kantor	615,00	11 jenis peralatan kantor	646,04	11 jenis peralatan kantor	710,64	11 jenis peralatan kantor	781,71	11 jenis peralatan kantor	859,88	11 jenis peralatan kantor	3.613,27	Bappeda	Kabupaten Badung
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	3 jenis komponen gedung	3 jenis komponen gedung	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis komponen gedung	3,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	37 Unit	37 Unit	141,63	35 Unit	170,27	35 Unit	187,30	35 Unit	206,03	35 Unit	226,63	37 Unit	931,86	Bappeda	Kabupaten Badung
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan kantor	7 jenis pemeliharaan	7 jenis pemeliharaan	114,50	4 jenis pemeliharaan	124,86	4 jenis pemeliharaan	137,35	4 jenis pemeliharaan	151,09	4 jenis pemeliharaan	166,19	7 jenis pemeliharaan	693,99	Bappeda	Kabupaten Badung
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor	2 jenis pemeliharaan	2 jenis pemeliharaan	79,75	2 jenis pemeliharaan	79,75	2 jenis pemeliharaan	87,73	2 jenis pemeliharaan	96,50	2 jenis pemeliharaan	106,15	2 jenis pemeliharaan	449,87	Bappeda	Kabupaten Badung
				29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terpeliharanya Peralatan meubelair	4 jenis meubelair	4 jenis meubelair	25,00	4 jenis meubelair	25,00	4 jenis meubelair	27,50	4 jenis meubelair	30,25	4 jenis meubelair	33,28	4 jenis meubelair	141,03	Bappeda	Kabupaten Badung
				46	Pemeliharaan Tanaman Hias	tersedianya Tanaman Hias untuk di Lingkungan Bappeda Litbang Kab. Badung	10 jenis tanaman	10 jenis tanaman	12,00	10 jenis tanaman	20,00	10 jenis tanaman	22,00	10 jenis tanaman	24,20	10 jenis tanaman	26,62	10 jenis tanaman	104,82	Bappeda	Kabupaten Badung
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	485,52	12 bulan	710,65	12 bulan	781,72	12 bulan	859,89	12 bulan	945,88	12 bulan	3.783,66	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	29 Orang	29 Orang	479,74	29 Orang	617,32	29 Orang	679,06	29 Orang	746,96	29 Orang	821,66	145 Orang	3.344,74	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		02 Penvusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Tersusunnya AKIP Bappeda	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	5,78	4 Jenis Dokumen	93,33	4 Jenis Dokumen	102,66	4 Jenis Dokumen	112,93	4 Jenis Dokumen	124,22	20 Jenis Dokumen	438,92	Bappeda	Kabupaten Badung	
				27 Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.019,11	23,64%	1.403,19	27,27%	836,77	30,91%	1.520,45	30,91%	5.270,96	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :																	
				01 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	1 paket	1 paket	241,44								1 paket	241,44	Bappeda	Kabupaten Badung		
				02 Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	400,00	1 paket	400,00	Bappeda	Kabupaten Badung		
				05 Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	Terlaksananya Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	-	-	-	-	-	1 paket	1.097,03	-	-	-	1 paket	1.097,03	Bappeda	Kabupaten Badung		
				xx Penyusunan Materi Teknis peninjauan kembali RTRW	Tersusunnya Materi Teknis peninjauan kembali RTRW								1 paket	500,00		1 paket	500,00				
				xx Penyusunan RAPERDA RTRW	Tersusunnya RAPERDA RTRW										1 Paket	750,00	1 paket	750,00			
				06 Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung		1 paket	1 kajian	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
				01 Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	-	-	-	1 Jenis Dokumen	162,14	1 Jenis Dokumen	178,36	1 Jenis Dokumen	196,19	1 Jenis Dokumen	215,81	4 Jenis Dokumen	752,50	Bappeda	Kabupaten Badung	
				03 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	-	-	-	1 laporan	116,18	1 laporan	127,80	1 laporan	140,58	1 laporan	154,64	1 laporan	539,19	Bappeda	Kabupaten Badung	
				04 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di	-	-	-	1 paket	740,79	-	-	-	-	-	-	1 paket	740,79	Bappeda	Kabupaten Badung	
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD		07 Program Perencanaan dan Pencapaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	966,14	100%	511,22	100%	187,34	100%	1.857,11	Bappeda	Kabupaten Badung	
				01 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	10,12	3 Jenis Dokumen	9,27	3 Jenis Dokumen	10,20	3 Jenis Dokumen	11,22	3 Jenis Dokumen	12,34	3 Jenis Dokumen	53,16	Bappeda	Kabupaten Badung	
				9 Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	Jumlah dokumen perubahan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	38 Dokumen	173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	173,01	Bappeda	Kabupaten Badung	
				xx Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	175,00	38 Dokumen	175,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx Penyusunan Analisis Standar Biaya	Tersusunnya Analisis Standar Biaya						1 Paket	955,94	1 Paket	500,00		2 Paket	1.455,94	Bappeda	Kabupaten Badung		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	549,20	100%	536,12	100%	589,73	100%	648,70	100%	713,57	100%	3.037,31	Bappeda	Kabupaten Badung
				42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	188,12	38 paket dokumen	209,02	38 paket dokumen	229,92	38 paket dokumen	252,92	38 paket dokumen	278,21	190 paket dokumen	1.158,18	Bappeda	Kabupaten Badung
				43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	361,08	38 paket dokumen	327,09	38 paket dokumen	359,80	38 paket dokumen	395,78	38 paket dokumen	435,36	190 paket dokumen	1.879,12	Bappeda	Kabupaten Badung
				21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	349,70	100%	612,06	100%	673,26	100%	740,59	100%	814,65	100%	3.190,25	Bappeda	Kabupaten Badung
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas		09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	200,98	120 buku	363,49	146 Buku	399,84	146 Buku	439,82	146 Buku	483,81	730 buku	1.887,94	Bappeda	Kabupaten Badung
				19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	600 buku	600 buku	45,95	600 buku	58,55	600 buku	64,40	600 buku	70,84	600 buku	77,93	3000 buku	317,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 Buku	80 Buku	102,77	80 Buku	190,02	80 Buku	209,02	80 Buku	229,92	80 Buku	252,91	400 buku	984,64	Bappeda	Kabupaten Badung
				15	Program Pengembangan Data/informasi Kegiatan :	tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	127,37	1 paket	140,11	1 paket	154,12	1 paket	169,53	1 paket	1.009,42	Bappeda	Kabupaten Badung
				05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100 buku	100 buku	150,82	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	150,82	Bappeda	Kabupaten Badung
				43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	200 buku	100 buku	135,33	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	135,33	Bappeda	Kabupaten Badung
				44	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah laporan data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 laporan	132,15	1 laporan	127,37	1 laporan	140,11	1 laporan	154,12	1 laporan	169,53	5 laporan	723,27	Bappeda	Kabupaten Badung
				21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	4.544,40	100%	4.810,98	100%	4.843,56	100%	4.942,34	100%	5.701,57	100%	24.842,85	Bappeda	Kabupaten Badung
				12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	100 buku	50 buku	22,61	50 buku	20,61	50 buku	22,68	50 buku	24,94	50 buku	27,44	250 buku	118,28	Bappeda	Kabupaten Badung
				62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	-	1 jenis Dokumen	500,62	-	-	1 jenis Dokumen	668,71	-	-	-	-	2 jenis Dokumen	1.169,33	Bappeda	Kabupaten Badung
39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	200 buku	125 buku	220,77	125 buku	237,82	125 buku	261,61	125 buku	287,77	125 buku	316,54	625 buku	1.324,51	Bappeda	Kabupaten Badung				
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	1 paket	-	4 jenis dokumen	211,86	4 jenis dokumen	233,05	4 jenis dokumen	256,35	4 jenis dokumen	281,98	16 jenis dokumen	983,24	Bappeda	Kabupaten Badung					
51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	7 SKPD	4 kali/tahun	150,06	4 kali/tahun	152,88	4 kali/tahun	168,16	4 kali/tahun	184,98	4 kali/tahun	203,48	20 kali/tahun	859,56	Bappeda	Kabupaten Badung				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				52	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	50 buku	200 buku	153,04	200 buku	205,21	300 buku	227,26	300 buku	249,99	300 buku	274,99	1300 buku	1.110,48	Bappeda	Kabupaten Badung
				53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring Penggunaan Dana APBN di Kab. Badung	80 buku	80 buku	81,91	80 buku	145,61	80 buku	160,17	80 buku	176,19	80 buku	193,80	80 buku	757,68	Bappeda	Kabupaten Badung
				61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	-	1 Jenis Dokumen	141,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenis Dokumen	141,38	Bappeda	Kabupaten Badung
				31	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	5 buku laporan	12,36	5 buku laporan	16,12	5 buku laporan	17,73	5 buku laporan	19,50	5 buku laporan	21,45	25 buku laporan	87,15	Bappeda	Kabupaten Badung
				64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan	2.465,45	2 Laporan	2.641,17	2 Laporan	2.905,29	2 Laporan	3.195,82	2 Laporan	3.515,40	10 Laporan	14.723,14	Bappeda	Kabupaten Badung
				65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan (Renja dan RKPD)	-	2 Jenis Dokumen	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis Dokumen	22,31	Bappeda	Kabupaten Badung
				66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	213,84	1 Laporan	213,84	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	213,84	Bappeda	Kabupaten Badung
				69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	-	1 Laporan	45,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	45,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	196,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	196,85	Bappeda	Kabupaten Badung
				71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	-	1 Laporan	40,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	40,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				72	SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	662,87	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	662,87	Bappeda	Kabupaten Badung
				74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	-	-	-	4 kali/tahun	106,40	4 kali/tahun	117,04	4 kali/tahun	128,74	4 kali/tahun	141,61	16 kali/tahun	493,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1 Laporan	19,76	1 Laporan	21,74	1 Laporan	23,91	1 Laporan	26,30	4 Laporan	91,71	Bappeda	Kabupaten Badung
				78	Pengelela Teknis dan Pemutahiran SIPD	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	140,34	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	140,34	Bappeda	Kabupaten Badung
				83	Workshop SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Laporan	275,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	275,38	Bappeda	Kabupaten Badung
				87	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Aplikasi	216,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	216,08	Bappeda	Kabupaten Badung
				79	Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	2 Laporan	36,49	2 Laporan	40,14	2 Laporan	44,15	2 Laporan	48,57	10 Laporan	169,35	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta						
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan		xx	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	Bappeda	Kabupaten Badung			
				xx	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	650,00	-	1 jenis Dokumen	650,00	Bappeda	Kabupaten Badung		
				22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	442,35	6 Kecamatan	486,59	6 Kecamatan	535,25	6 Kecamatan	2.113,37	Bappeda	Kabupaten Badung			
				Kegiatan :																				
				04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikordinasikan Program dan Kejadiannya	5 SKPD/ 2 bagian	9 PD & 3 Bagian	107,08	8 PD & 3 Bagian	198,36	9 PD & 3 Bagian	218,20	9 PD & 3 Bagian	240,02	9 PD & 3 Bagian	264,02	9 PD & 3 Bagian	1.027,67	Bappeda	Kabupaten Badung			
				17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan	-	3 Perangkat Daerah	73,69	3 Perangkat Daerah	129,59	3 Perangkat Daerah	142,55	3 Perangkat Daerah	156,80	3 Perangkat Daerah	172,48	3 Perangkat Daerah	675,11	Bappeda	Kabupaten Badung			
				18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pengembangan Dunia Usaha	-	2 Perangkat Daerah	66,27	2 Perangkat Daerah	74,19	2 Perangkat Daerah	81,61	2 Perangkat Daerah	89,77	2 Perangkat Daerah	98,75	2 Perangkat Daerah	410,59	Bappeda	Kabupaten Badung			
				24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	0,00	4 paket	613,61	3 paket	98,99	3 paket	108,89	2 paket	119,78	15 paket	941,27	Bappeda	Kabupaten Badung			
				Kegiatan :																				
				04	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	-	-	10 buku	45,00	10 buku	49,50	10 buku	54,45	10 buku	59,89	10 buku	208,83	Bappeda	Kabupaten Badung				
				06	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	-	-	-	58,01	-	-	-	-	-	-	1 Paket	58,01	Bappeda	Kabupaten Badung				
				07	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	10 buku	45,00	10 buku	49,50	10 buku	54,45	10 buku	59,89	40 buku	208,83	Bappeda	Kabupaten Badung				
				06	Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	1 paket	465,60	-	-	-	-	-	-	1 paket	465,60	Bappeda	Kabupaten Badung				
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung				
				Kegiatan :																				
				Pelatihan Penyeragaman Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pusat	Jumlah Aparat Perencanaan Pembangunan yang mendapat bimtek	-	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung							
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	678,66	100%	555,90	100%	611,49	100%	672,64	100%	739,90	100%	3.258,60	Bappeda	Kabupaten Badung							
Kegiatan :																								
33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	-	4kali/tahun	126,42	4kali/tahun	365,07	4kali/tahun	401,57	4kali/tahun	441,73	4kali/tahun	485,90	4kali/tahun	1.820,68	Bappeda	Kabupaten Badung							
65	Pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	-	1 Aplikasi	552,25	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	552,25	Bappeda	Kabupaten Badung								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta						
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah		76 Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	-	-	-	1 Laporan	190,84	1 Laporan	209,92	1 Laporan	230,91	1 Laporan	254,00	4 Laporan	885,67	Bappeda	Kabupaten Badung				
					24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	303,64	4 paket	251,42	3 paket	276,56	3 paket	304,22	2 paket	334,64	15 paket	1.470,47	Bappeda	Kabupaten Badung			
					Kegiatan :																			
					01 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan wilayah	-	3 kali/tahun	132,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali/tahun	132,18	Bappeda	Kabupaten Badung
					02 Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	3 kali/tahun	94,12	4 kali/tahun	94,78	4 kali/tahun	104,26	4 kali/tahun	114,69	4 kali/tahun	126,15	19 kali/tahun	534,01	Bappeda	Kabupaten Badung			
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah		05 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	-	4kali/tahun	77,33	4kali/tahun	156,64	4kali/tahun	172,30	4kali/tahun	189,53	4kali/tahun	208,48	20kali/tahun	804,28	Bappeda	Kabupaten Badung				
				27 Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%		20,00%	177,49	23,64%	195,24	27,27%	214,77	30,91%	236,24	30,91%	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung					
				Kegiatan :																				
				02 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	-	-	-	4 kali/tahun	177,49	4 kali/tahun	195,24	4 kali/tahun	214,77	4 kali/tahun	236,24	4 kali/tahun	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung				

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016
Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	940,37	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Kegiatan :							
				08	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung	160 Buku	376,72	Bappeda	Kabupaten Badung	
				24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Usulan program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang diavai APBN	1 kali	48,23	Bappeda	Kabupaten Badung	
				35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung	160 Buku	128,28	Bappeda	Kabupaten Badung	
				41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	14,52	Bappeda	Kabupaten Badung	
				45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD	165 buku	115,66	Bappeda	Kabupaten Badung	
				46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	165 buku	173,96	Bappeda	Kabupaten Badung	
				47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	165 buku	37,87	Bappeda	Kabupaten Badung	
48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	165 buku	45,14	Bappeda	Kabupaten Badung					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 paket	1.037,17	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				01 Pelayanan jasa administrasi keuangan		3 jenis benda pos	8,22	Bappeda	Kabupaten Badung
				02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2 jenis jasa komunikasi	62,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		37 Unit	18,80	Bappeda	Kabupaten Badung
				10 Penyediaan alat tulis kantor		28 jenis alat tulis kantor	32,07	Bappeda	Kabupaten Badung
				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35 jenis cetakan	130,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	6,51	Bappeda	Kabupaten Badung
				14 Penyediaan peralatan rumah tangga		11 jenis alat RT	14,28	Bappeda	Kabupaten Badung
				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10 Jenis Surat Kabar/Majalah	59,74	Bappeda	Kabupaten Badung
				17 Penyediaan makanan dan minuman		9 jenis konsumsi	25,99	Bappeda	Kabupaten Badung
				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Paket	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				19 Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah		2 jenis lomba (olahraga dan seni)	14,97	Bappeda	Kabupaten Badung
				24 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan		13 jenis sarana upakara	34,85	Bappeda	Kabupaten Badung
				25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyanan Jaat		2 pura	40,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				27 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan		30084 Liter	339,46	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1.106,62	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	230,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor		9 jenis perlengkapan kantor	345,41	Bappeda	Kabupaten Badung
				10 Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair		1 paket	201,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3 jenis komponen gedung	2,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		37 Unit	182,63	Bappeda	Kabupaten Badung
				26 Pemeliharaan perlengkapan kantor		7 jenis pemeliharaan	77,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				28 Pemeliharaan peralatan kantor		2 jenis pemeliharaan	30,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		4 jenis pemeliharaan	25,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				46 Pemeliharaan Tanaman Hias		10 jenis tanaman	12,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	355,98	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		29 Orang	351,04	Bappeda	Kabupaten Badung
				03 Survey Kepuasan Masyarakat		12 Bulan	4,94	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	6,25	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah		30 buku	6,25	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		18 Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan		438,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				56 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RDTR Desa Wisata di Kabupaten Badung		1 paket	192,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				57 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTBL Kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan		1 Paket	115,80	Bappeda	Kabupaten Badung
				58 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu		1 Paket	130,50	Bappeda	Kabupaten Badung
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD		09 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	1 paket	31,32	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD		Kegiatan :					
				01 Penyusunan Dokumen Rencana SKPD		3 paket	9,65	Bappeda	Kabupaten Badung
				02 Verifikasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021		1 paket	21,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	479,81	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				42 Penelitian RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016		53 set	171,72	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah <i>stakeholders</i> yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	18	43 Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2017	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	53 set	308,09	Bappeda	Kabupaten Badung
				Program Perencanaan Tata Ruang		875,75	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :					
				29 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kab. Badung melalui BKPRD		1 paket	375,75	Bappeda	Kabupaten Badung
				55 Ortorektifikasi Peta Dasar Pendukung RDTR Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang		1 paket	500,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1 paket	424,96	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung		160 Buku	271,09	Bappeda	Kabupaten Badung
				19 Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan		600 buku	34,04	Bappeda	Kabupaten Badung
				26 Penyelenggaraan Forum SKPD		80 Buku	119,84	Bappeda	Kabupaten Badung
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kerjanya 100% keatas	15	Program Pengembangan Data/informasi	Tersedianya data dan informasi yang valid	1 paket	963,98	Bappeda	Kabupaten Badung
				05 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung		100 buku	98,97	Bappeda	Kabupaten Badung
				43 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung		1 paket	125,33	Bappeda	Kabupaten Badung
				44 Pembangunan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung			349,28	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				xx Pembuatan Dokumentasi Visual RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021			199,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx Pembuatan Dokumentasi Visual Profil dan Potensi Daerah			190,80	Bappeda	Kabupaten Badung
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	2.137,36	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				12 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung		100 buku	22,61	Bappeda	Kabupaten Badung
				29 Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021		211 buku	1.151,56	Bappeda	Kabupaten Badung
				33 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		6 Kali	132,27	Bappeda	Kabupaten Badung
				39 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		200 buku	225,47	Bappeda	Kabupaten Badung
				51 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial		7 SKPD	129,70	Bappeda	Kabupaten Badung
				52 Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD Kabupaten Badung		200 buku	141,35	Bappeda	Kabupaten Badung
				53 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung		80 buku	81,91	Bappeda	Kabupaten Badung
				56 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang statistik, monitoring dan evaluasi		750 buku	146,65	Bappeda	Kabupaten Badung
				58 Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Paket	59,46	Bappeda	Kabupaten Badung
				60 Pemutakhiran e-Musrenbang		1 Paket	46,37	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	394,47	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		5 SKPD/ 2 bagian	11,61	Bappeda	Kabupaten Badung
				15 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah		2 kali	360,21	Bappeda	Kabupaten Badung
				17 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian		6 kali	12,47	Bappeda	Kabupaten Badung
				18 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha di Kabupaten Badung			10,17	Bappeda	Kabupaten Badung
				24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	145,24	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				01 Koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah		1 Paket	145,24	Bappeda	Kabupaten Badung

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Bappeda Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi																			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta																					
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	3	01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	100%	9.248,32	-	10.359,10	-	11.563,10	-	11.075,56	-	12.673,12	-	54.919,21	Bappeda	Kabupaten Badung																			
					FUNGSI PERENCANAAN																9.248,32	10.359,10	11.563,10	11.075,56	12.673,12	54.919,21	Bappeda	Kabupaten Badung											
					21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah																887,01	1.243,63	100%	1.322,48	100%	1.454,73	1.600,20	100%	6.508,06	Bappeda	Kabupaten Badung								
					Kegiatan :																																		
					08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah																160 Buku	146 Buku	319,40	120 buku	409,16	146 Buku	464,57	146 Buku	511,03	146 Buku	562,13	730 buku	2.266,29	Bappeda	Kabupaten Badung				
					24 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP																1 kali	1 Dokumen	97,74	1 Dokumen	152,07	1 Dokumen	118,27	1 Dokumen	130,09	1 Dokumen	143,10	5 Dokumen	641,28	Bappeda	Kabupaten Badung				
					35 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung																160 Buku	146 Buku	165,76	120 buku	198,92	146 Buku	200,58	146 Buku	220,63	146 Buku	242,70	730 buku	1.028,59	Bappeda	Kabupaten Badung				
					41 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik																1 laporan	1 laporan	15,67	1 laporan	10,65	1 laporan	18,96	1 laporan	20,86	1 laporan	22,94	5 laporan	89,08	Bappeda	Kabupaten Badung				
					45 Penyusunan Kebijakan Umum APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	71,07	1 Jenis Dokumen	157,21	1 Jenis Dokumen	172,93	1 Jenis Dokumen	190,22	1 Jenis Dokumen	209,24	5 Jenis Dokumen	800,66	Bappeda	Kabupaten Badung				
					46 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	152,32	1 Jenis Dokumen	167,55	1 Jenis Dokumen	184,31	1 Jenis Dokumen	202,74	1 Jenis Dokumen	223,01	5 Jenis Dokumen	929,93	Bappeda	Kabupaten Badung				
					47 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	47,72	1 Jenis Dokumen	115,45	1 Jenis Dokumen	127,00	1 Jenis Dokumen	139,69	1 Jenis Dokumen	153,66	5 Jenis Dokumen	583,52	Bappeda	Kabupaten Badung				
					48 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	17,33	1 Jenis Dokumen	32,62	1 Jenis Dokumen	35,88	1 Jenis Dokumen	39,47	1 Jenis Dokumen	43,41	5 Jenis Dokumen	168,71	Bappeda	Kabupaten Badung				
																						b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		27 Program Perencanaan Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.019,11	23,64%	1.403,19	27,27%	836,77	30,91%	1.520,45	30,91%	5.270,96	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																																			
				01 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	1 paket	1 paket	241,44								1 paket	241,44	Bappeda	Kabupaten Badung																				
				02 Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	400,00	1 paket	400,00	Bappeda	Kabupaten Badung																			
				05 Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	Terlaksananya Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	-	-	-	-	-	1 paket	1.097,03	-	-	-	1 paket	1.097,03	Bappeda	Kabupaten Badung																				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				xx	Penyusunan Materi Teknis peninjauan kembali RTRW	Tersusunnya Materi Teknis peninjauan kembali RTRW							1 paket	500,00			1 paket	500,00			
				xx	Penyusunan RAPERDA RTRW	Tersusunnya RAPERDA RTRW									1 Paket	750,00	1 paket	750,00			
				06	Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung		1 paket	1 kajian	250,00	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
				01	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	-	-	-	1 Jenis Dokumen	162,14	1 Jenis Dokumen	178,36	1 Jenis Dokumen	196,19	1 Jenis Dokumen	215,81	4 Jenis Dokumen	752,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				03	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	-	-	-	1 laporan	116,18	1 laporan	127,80	1 laporan	140,58	1 laporan	154,64	1 laporan	539,19	Bappeda	Kabupaten Badung
				04	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di	-	-	-	1 paket	740,79	-	-	-	-	-	-	1 paket	740,79	Bappeda	Kabupaten Badung
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD		07	Program Perencanaan dan Peningkatan Perangkat Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKP	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	966,14	100%	511,22	100%	187,34	100%	1.857,11	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKP		01	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	10,12	3 Jenis Dokumen	9,27	3 Jenis	10,20	3 Jenis	11,22	3 Jenis	12,34	3 Jenis	53,16	Bappeda	Kabupaten Badung
				9	Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	Jumlah dokumen perubahan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	38 Dokumen	173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	173,01	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	175,00	38 Dokumen	175,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Penyusunan Analisis Standar Biaya	Tersusunnya Analisis Standar Biaya						1 Paket	955,94	1 Paket	500,00			2 Paket	1.455,94		
				21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKP dengan RPJMD	100%	100%	549,20	100%	536,12	100%	589,73	100%	648,70	100%	713,57	100%	3.037,31	Bappeda	Kabupaten Badung
				42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	188,12	38 paket dokumen	209,02	38 paket	229,92	38 paket	252,92	38 paket	278,21	190 paket	1.158,18	Bappeda	Kabupaten Badung
				43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	361,08	38 paket dokumen	327,09	38 paket	359,80	38 paket	395,78	38 paket	435,36	190 paket	1.879,12	Bappeda	Kabupaten Badung
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan kegiatan		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara RKP dengan RPJMD	100%	100%	349,70	100%	612,06	100%	673,26	100%	740,59	100%	814,65	100%	3.190,25	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang		09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	200,98	120 buku	363,49	146 Buku	399,84	146 Buku	439,82	146 Buku	483,81	730 buku	1.887,94	Bappeda	Kabupaten Badung
				19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	600 buku	600 buku	45,95	600 buku	58,55	600 buku	64,40	600 buku	70,84	600 buku	77,93	3000 buku	317,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 Buku	80 Buku	102,77	80 Buku	190,02	80 Buku	209,02	80 Buku	229,92	80 Buku	252,91	400 buku	984,64	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi					
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta							
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas		15	Program Pengembangan Data/informasi	tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	127,37	1 paket	140,11	1 paket	154,12	1 paket	169,53	1 paket	1.009,42	Bappeda	Kabupaten Badung				
				Kegiatan :																					
				05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100 buku	100 buku	150,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	150,82	Bappeda	Kabupaten Badung	
				43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	200 buku	100 buku	135,33												100 buku	135,33	Bappeda	Kabupaten Badung	
				44	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah laporan data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 laporan	132,15	1 laporan	127,37	1 laporan	140,11	1 laporan	154,12	1 laporan	169,53	5 laporan	723,27				Bappeda	Kabupaten Badung	
				21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	4.544,40	100%	4.810,98	100%	4.843,56	100%	4.942,34	100%	5.701,57	100%	24.842,85				Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :																					
				12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	100 buku	50 buku	22,61	50 buku	20,61	50 buku	22,68	50 buku	24,94	50 buku	27,44	250 buku	118,28				Bappeda	Kabupaten Badung	
				62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	-	1 jenis Dokumen	500,62	-	-	1 jenis Dokumen	668,71	-	-	-	-	-	2 jenis Dokumen	1.169,33			Bappeda	Kabupaten Badung	
				39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	200 buku	125 buku	220,77	125 buku	237,82	125 buku	261,61	125 buku	287,77	125 buku	316,54	625 buku	1.324,51				Bappeda	Kabupaten Badung	
				44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	1 paket	4 jenis dokumen	211,86	4 jenis dokumen	233,05	4 jenis dokumen	256,35	4 jenis dokumen	281,98	16 jenis dokumen	983,24						Bappeda	Kabupaten Badung	
				51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	7 SKPD	4 kali/tahun	150,06	4 kali/tahun	152,88	4 kali/tahun	168,16	4 kali/tahun	184,98	4 kali/tahun	203,48	20 kali/tahun	859,56				Bappeda	Kabupaten Badung	
				52	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	50 buku	200 buku	153,04	200 buku	205,21	300 buku	227,26	300 buku	249,99	300 buku	274,99	1300 buku	1.110,48				Bappeda	Kabupaten Badung	
53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring Penggunaan Dana APBN di Kab. Badung	80 buku	80 buku	81,91	80 buku	145,61	80 buku	160,17	80 buku	176,19	80 buku	193,80	80 buku	757,68				Bappeda	Kabupaten Badung					
61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	-	1 Jenis Dokumen	141,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenis Dokumen	141,38				Bappeda	Kabupaten Badung					
31	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	5 buku laporan	12,36	5 buku laporan	16,12	5 buku laporan	17,73	5 buku laporan	19,50	5 buku laporan	21,45	25 buku laporan	87,15				Bappeda	Kabupaten Badung					
64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan	2.465,45	2 Laporan	2.641,17	2 Laporan	2.905,29	2 Laporan	3.195,82	2 Laporan	3.515,40	10 Laporan	14.723,14				Bappeda	Kabupaten Badung					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan (Renja dan RKPD)	-	2 Jenis Dokumen	22,31								-	2 Jenis Dokumen	22,31	Bappeda	Kabupaten Badung
				66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-			1 Laporan	213,84	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	213,84	Bappeda	Kabupaten Badung
				69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	-	1 Laporan	45,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	45,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	196,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	196,85	Bappeda	Kabupaten Badung
				71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	-	1 Laporan	40,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	40,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				72	SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	662,87	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	662,87	Bappeda	Kabupaten Badung
				74	Rapat Koordinasi Teknis Penyeragaman Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyeragaman dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	-	-	-	4 kali/tahun	106,40	4 kali/tahun	117,04	4 kali/tahun	128,74	4 kali/tahun	141,61	16 kali/tahun	493,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1 Laporan	19,76	1 Laporan	21,74	1 Laporan	23,91	1 Laporan	26,30	4 Laporan	91,71	Bappeda	Kabupaten Badung
				78	Penyelenggara Teknis dan Pemutakhiran SIPD	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	140,34	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	140,34	Bappeda	Kabupaten Badung
				83	Workshop SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Laporan	275,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	275,38	Bappeda	Kabupaten Badung
				87	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Aplikasi	216,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	216,08	Bappeda	Kabupaten Badung
				79	Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	-			2 Laporan	36,49	2 Laporan	40,14	2 Laporan	44,15	2 Laporan	48,57	10 Laporan	169,35	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	650,00	1 jenis Dokumen	650,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
				22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	442,35	6 Kecamatan	486,59	6 Kecamatan	535,25	6 Kecamatan	2.113,37	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kejadiannya	5 SKPD/ 2 bagian	9 PD & 3 Bagian	107,08	8 PD & 3 Bagian	198,36	9 PD & 3 Bagian	218,20	9 PD & 3 Bagian	240,02	9 PD & 3 Bagian	264,02	9 PD & 3 Bagian	1.027,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian	-	3 Perangkat Daerah	73,69	3 Perangkat Daerah	129,59	3 Perangkat Daerah	142,55	3 Perangkat Daerah	156,80	3 Perangkat Daerah	172,48	3 Perangkat Daerah	675,11	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi							
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta									
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan		18 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pengembangan Dunia Usaha	-	2 Perangkat Daerah	66,27	2 Perangkat Daerah	74,19	2 Perangkat Daerah	81,61	2 Perangkat Daerah	89,77	2 Perangkat Daerah	98,75	2 Perangkat Daerah	410,59	Bappeda	Kabupaten Badung							
							24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	0,00	4 paket	613,61	3 paket	98,99	3 paket	108,89	2 paket	119,78	15 paket	941,27	Bappeda	Kabupaten Badung				
							Kegiatan :																				
							04 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	-	-	10 buku	45,00	10 buku	49,50	10 buku	54,45	10 buku	59,89	10 buku	208,83	Bappeda	Kabupaten Badung					
							06 Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	-	-	-	58,01	-	-	-	-	-	-	1 Paket	58,01	Bappeda	Kabupaten Badung					
							07 Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	10 buku	45,00	10 buku	49,50	10 buku	54,45	10 buku	59,89	40 buku	208,83	Bappeda	Kabupaten Badung					
							06 Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	1 paket	465,60	-	-	-	-	-	-	1 paket	465,60	Bappeda	Kabupaten Badung					
							05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung					
							Kegiatan :																				
											Pelatihan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pusat	Jumlah Aparat Perencanaan Pembangunan yang mendapat bimtek	-	-	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung	
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan		21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	100%	100%	678,66	100%	555,90	100%	611,49	100%	672,64	100%	739,90	100%	3.258,60	Bappeda	Kabupaten Badung							
				Kegiatan :																							
				33 Sinerqi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sinerqi Penanggulangan Kemiskinan	-	-	4kali/tahun	126,42	4kali/tahun	365,07	4kali/tahun	401,57	4kali/tahun	441,73	4kali/tahun	485,90	4kali/tahun	1.820,68	Bappeda	Kabupaten Badung						
				65 Pambangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	-	-	1 Aplikasi	552,25	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	552,25	Bappeda	Kabupaten Badung								
				76 Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	-	-	1 Laporan	190,84	1 Laporan	209,92	1 Laporan	230,91	1 Laporan	254,00	4 Laporan	885,67	Bappeda	Kabupaten Badung								
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah		24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	303,64	4 paket	251,42	3 paket	276,56	3 paket	304,22	2 paket	334,64	15 paket	1.470,47	Bappeda	Kabupaten Badung							
				Kegiatan :																							
				01 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan wilayah	-	-	3 kali/tahun	132,18	-	-	-	-	-	-	3 kali/tahun	132,18	Bappeda	Kabupaten Badung								
				02 Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	3 kali/tahun	94,12	4 kali/tahun	94,78	4 kali/tahun	104,26	4 kali/tahun	114,69	4 kali/tahun	126,15	19 kali/tahun	534,01	Bappeda	Kabupaten Badung						
				05 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	-	-	4kali/tahun	77,33	4kali/tahun	156,64	4kali/tahun	172,30	4kali/tahun	189,53	4kali/tahun	208,48	20kali/tahun	804,28	Bappeda	Kabupaten Badung						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				27 Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%			20,00%	177,49	23,64%	195,24	27,27%	214,77	30,91%	236,24	30,91%	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan : 02 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	-	-	-	4 kali/tahun	177,49	4 kali/tahun	195,24	4 kali/tahun	214,77	4 kali/tahun	236,24	4 kali/tahun	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
2	Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	80%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
3	Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
4	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah <i>stakeholders</i> yang menyampaikan usulan kegiatan	53 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak
6	Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
7	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	97%	98%	99%	99%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
8	Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	97%	98%	99%	99%
9	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	-	85%	86%	87%	88%	90%	90%
10	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	-	90%	91%	92%	93%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LANTAI 2 UNIT 14
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009239 FAX. (0361) 9009239
MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BADUNG,



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670127 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 23 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Bappeda
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

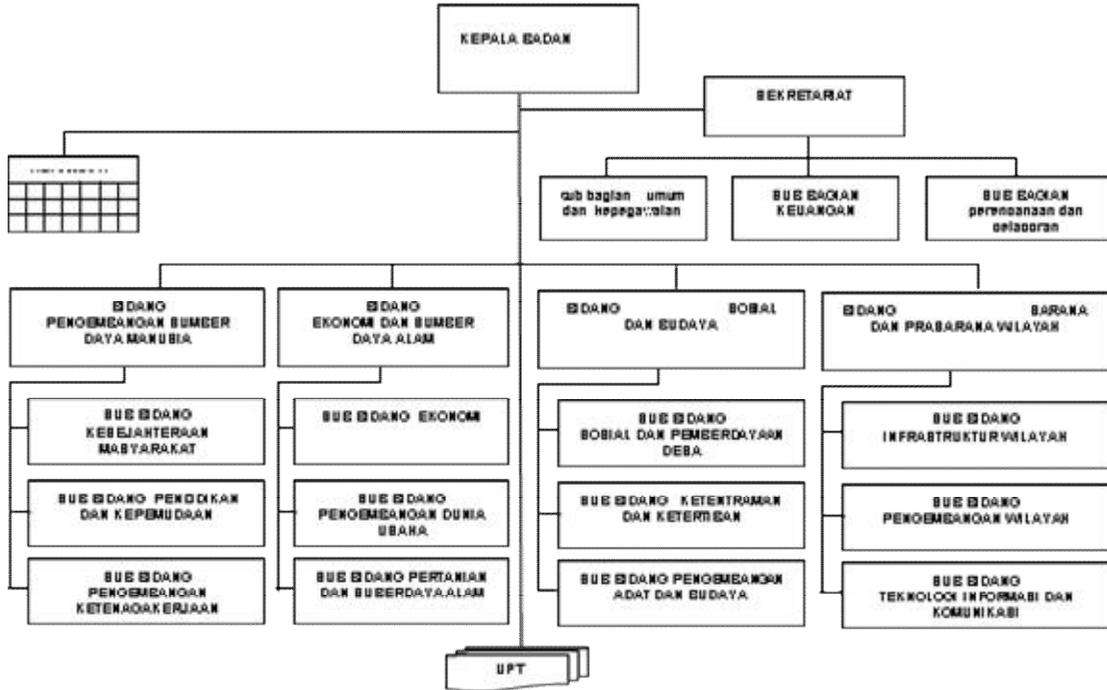
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan susunan organisasi Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Sub Bidang Pertanian Dan Sumber daya Alam;
- e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Desa;
 - b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Adat dan Budaya;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - c. Sub Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana kerja Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral;
- 6) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja termasuk program dari pemerintah atasan;
- 7) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- 8) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 9) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 10) Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian targettarget kinerja program;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik daerah dan pelaporan;
 - 3) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan;
 - 6) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 8) Mengkoordinasikan penyiapan laporan materi evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, pemuda olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, kepegawaian dan sekretariat daerah;

- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, perikanan dan energi sumber daya mineral;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Sosial Dan Budaya;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
- 1) Menyusun program kerja Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
 - 10) Mengoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);

- 11) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja dan program;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat perencana yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Bappeda.

Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP		SD
1	Kepala Bappeda		1			1				1							1
2	Sekretaris Bappeda			1		1				1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1					1							1
	b Kasubag. Keuangan				1						1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1						1						1
	d Staf					18	8	3	1	15		1		9	2	1	29
3	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia			1		1				1							1
	a Kasubid. Kesejahteraan Masyarakat				1					1							1
	b Kasubid. Pendidikan dan Kepemudaan				1	1				1							1
	c Kasubid. Pengembangan Ketenagakerjaan				1	1				1							1
	d Staf						7	2		2	5			2			9
4	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam			1		1				1							1
	a Kasubid Ekonomi				1	1				1							1
	b Kasubid Pengembangan Dunia Usaha				1	1				1							1
	c Pertanian Dan Suberdaya Alam				1	1				1							1
	d Staf						8	1			7			2			9
5	Kabid Sosial dan Budaya			1		1				1							1
	a Kasubid. Sosial dan Pemberdayaan Desa				1		1				1						1
	b Kasubid. Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1						1
	c Kasubid. Pengembangan Adat dan Budaya				1		1				1						1
	d Staf						7	2		2	5			2			9
6	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah			1		1				1							1
	a Kasubid. Infrastruktur Wilayah				1		1			1							1
	b Kasubid. Pengembangan Wilayah				1		1				1						1
	c Kasubid. Teknologi Informasi Dan Komunikasi				1		1			1							1
	d Staf						8	1		1	7			1			9
	Jumlah	0	1	5	15	11	58	14	3	21	45	0	1	16	2	1	86

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Bappeda telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Bappeda ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mobil Station Wagon	9	X		
2	Sepeda Motor	31	X		
3	Global Positioning System	5	X		
4	Scanner	2	X		
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	X		
6	Mesin Ketik Elektronik	1	X		
7	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	X		
8	Lemari Besi	2	X		
9	Rak Kayu	16	X		
10	Filling Besi/Metal	6	X		
11	Band Kas	5	X		
12	Lemari kayu	11	X		
13	Alat Penghancur Kertas	4	X		
14	Papan Nama Instansi	1	X		
15	Papan Pengumuman	4	X		
16	White Board	1	X		
17	Mesin Absensi	1	X		
18	Overhead Projektor	1	X		
19	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	X		
20	Lemari Kayu	3	X		
21	Rak Kayu	12	X		
22	Meja Kayu/Rotan	6	X		
23	Meja Rapat	58	X		
24	Meja Telpon	1	X		
25	Meja Podium	1	X		
26	Kursi Rapat	49	X		
27	Kursi Putar	44	X		
28	Meja Komputer	4	X		
29	Meja Piket	1	X		
30	Sofa	1	X		
31	Lemari Pakaian	4	X		
32	Lemari Rias	1	X		
33	MOUBILER LAINNYA	13	X		
34	Jam Elektronik	2	X		
35	Alat Pembersih Lain-lain	2	X		
36	AC Split	3	X		
37	Alat Dapur Lain-lain	1	X		
38	Televisi	11	X		
39	Sound System	4	X		
40	Wireless	1	X		
41	Unit Power Supply	2	X		
42	Camera Video	1	X		
43	Camera Film	11	X		
44	Dispenser	6	X		
45	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	X		
46	Local Area Network (LAN)	1	X		
47	P.C Unit	50	X		
48	Lap Top	29	X		
49	Note Book	34	X		

50	Storage Modul Disk	1	X		
51	Monitor	9	X		
52	Printer	55	X		
53	Scanner	1	X		
54	External	9	X		
55	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	X		
56	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	X		
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	X		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	X		
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	X		
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	X		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	X		
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	X		
63	Buffet Kayu	1	X		
64	Proyektor + Attachment	14	X		
65	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6	X		
66	Camera Film	3	X		
67	Vertical Motorized Flim Rewinder	4	X		
68	Mesin Jilid	8	X		
69	Telephone (PABX)	1	X		
70	Pesawat Telephone	2	X		
71	Facsimile	3	X		
72	Personal Komputer	1	X		

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2005-2016 Bappeda Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Disamping itu pula sebagai Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
- b. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- c. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- d. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Perencanaan Pembangunan																		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	17.379.372	21.470.905	20.615.144	20.066.011	23.950.236	14.535.993	17.294.202	17.998.356	18.061.035	20.199.351	83,64	80,55	87,31	90,01	84,34	1.642.716	5.663.359
Belanja Aparatur	12.963.656	12.969.856	13.910.757	13.402.710	15.472.544	10.150.067	10.150.067	12.210.726	12.548.509	13.235.190	78,30	78,26	87,78	93,63	85,54	627.222	3.085.123
Belanja Tidak Langsung	9.541.168	11.612.818	12.019.346	12.343.570	14.591.658	7.955.903	8.930.910	10.548.106	11.655.930	12.506.898	83,38	76,91	87,76	94,43	85,71	1.262.622	4.550.995
Belanja Langsung	7.838.204	9.858.087	8.595.799	7.722.441	9.358.579	6.580.090	8.363.292	7.450.250	6.405.105	7.692.454	83,95	84,84	86,67	82,94	82,20	380.094	1.112.364
Total Belanja Daerah	17.379.372	21.470.905	20.615.144	20.066.011	23.950.236	14.535.993	17.294.202	17.998.356	18.061.035	20.199.351	83,64	80,55	87,31	90,01	84,34	1.642.716	5.663.359

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Keberhasilan Bappeda Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung yaitu :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Pengembangan pembiayaan pembangunan daerah yang tidak lagi bertumpu pada pemerintah melainkan adanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Peningkatan kualitas SDM perencana yang mampu dan cepat, baik dalam pengelolaan pembangunan maupun dukungan perangkat jaringan informasi pembangunan yang memadai.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *trend* peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun akan semakin meningkat pula ketersediaan dana pembangunan daerah.
- b. Dengan adanya pengembangan desentralisasi pembangunan mengakibatkan terjadinya pergeseran kegiatan pembangunan ke daerah, sehingga segala aktivitas perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan pembangunan dialihkan ke daerah.
- c. Semakin intensifnya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maka Bappeda sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat segera menjabarkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Badung. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Badung.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Bappeda memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Bappeda Kabupaten Badung.

Permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Badung antara lain :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang perencanaan.
2. Belum sempurnanya basis data pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya.
3. Belum maksimalnya penelitian dan pengembangan yang dapat menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Masalah eksternal yang dihadapi Bappeda Kabupaten Badung adalah :

1. Belum optimalnya perencanaan yang bersifat partisipatif dimana idealnya proses perencanaan yang baik sangat memerlukan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan sektor di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan SDM perencanaan, pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;

- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
4. Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1. Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1. Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1. Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan akomodasi wisata
11. Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1. Pengembangan permukiman 2. Pembangunan jalan
13. Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1. Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitar-nya
13. Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

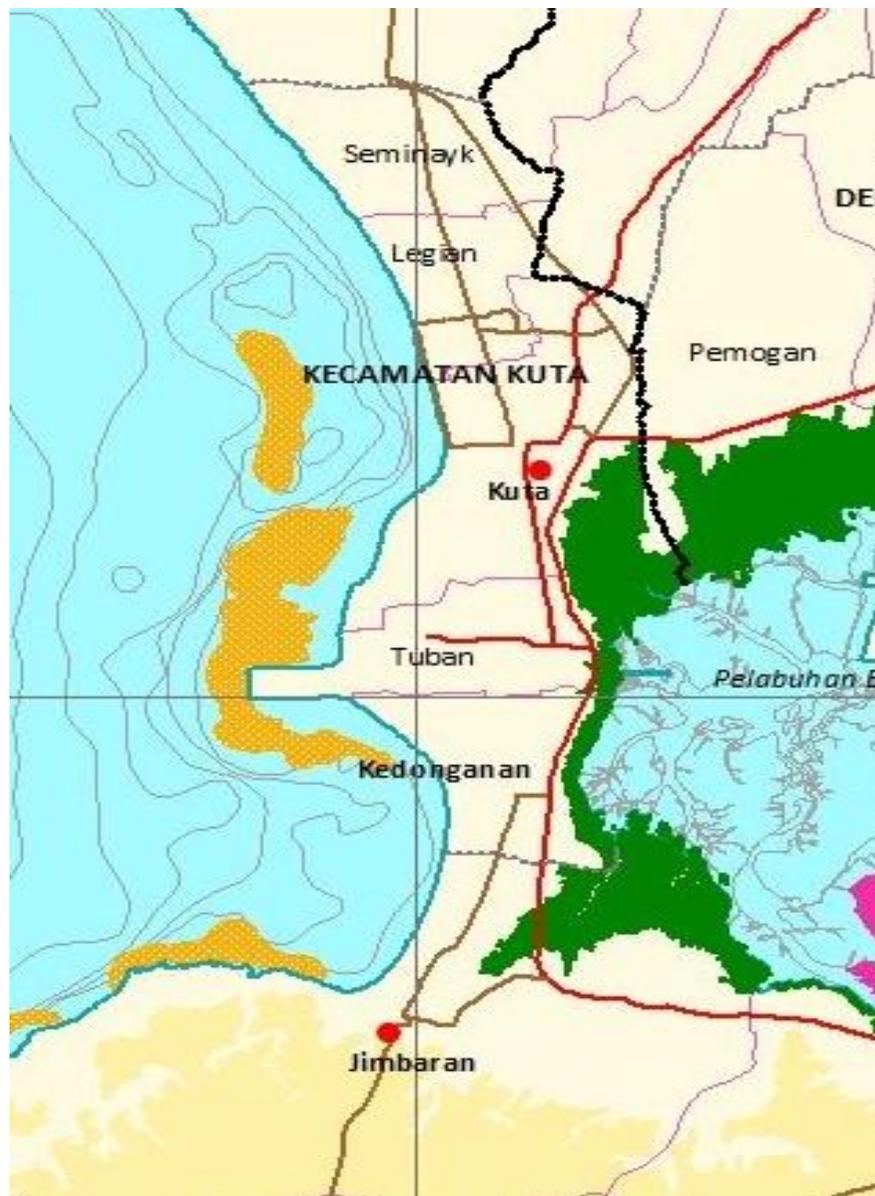
Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.
2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 		

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

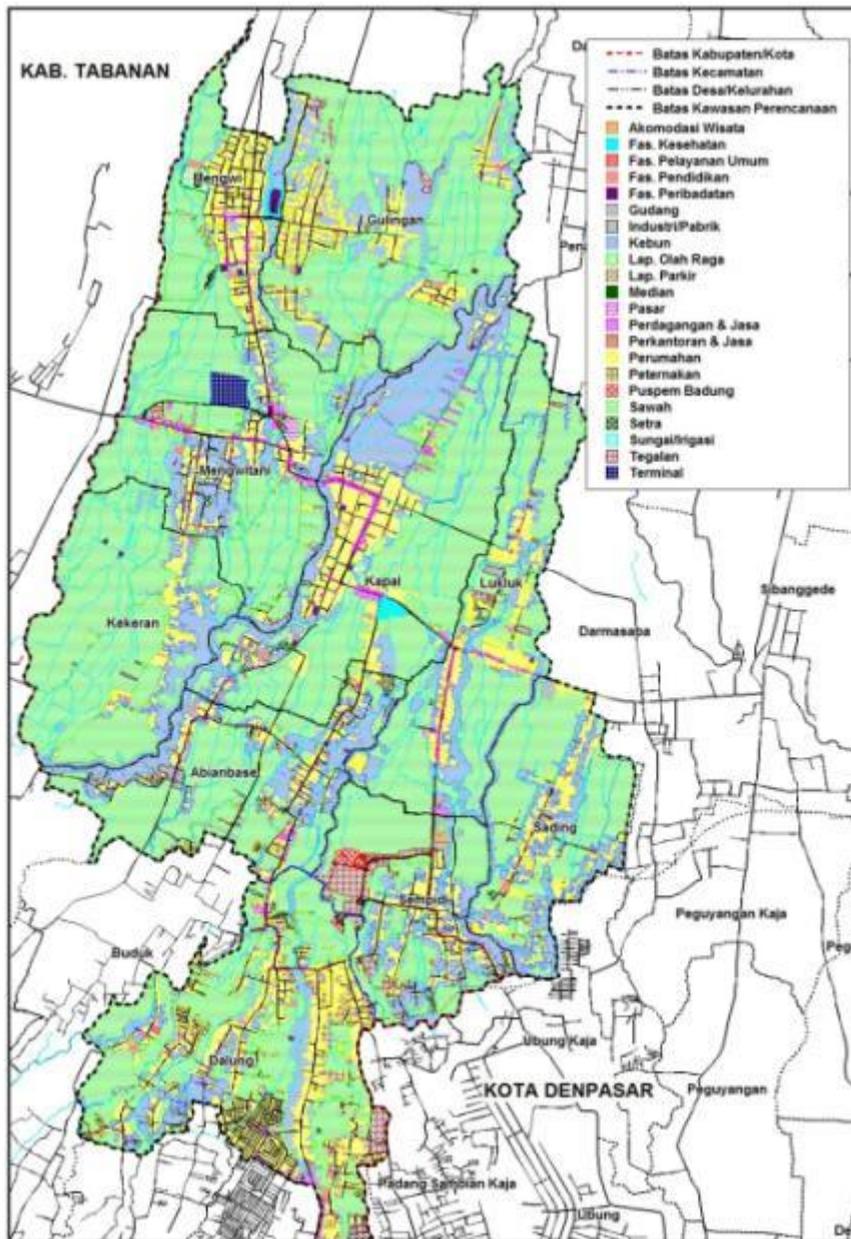
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.

	4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	
--	--	--

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintahan dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir.
2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. 		

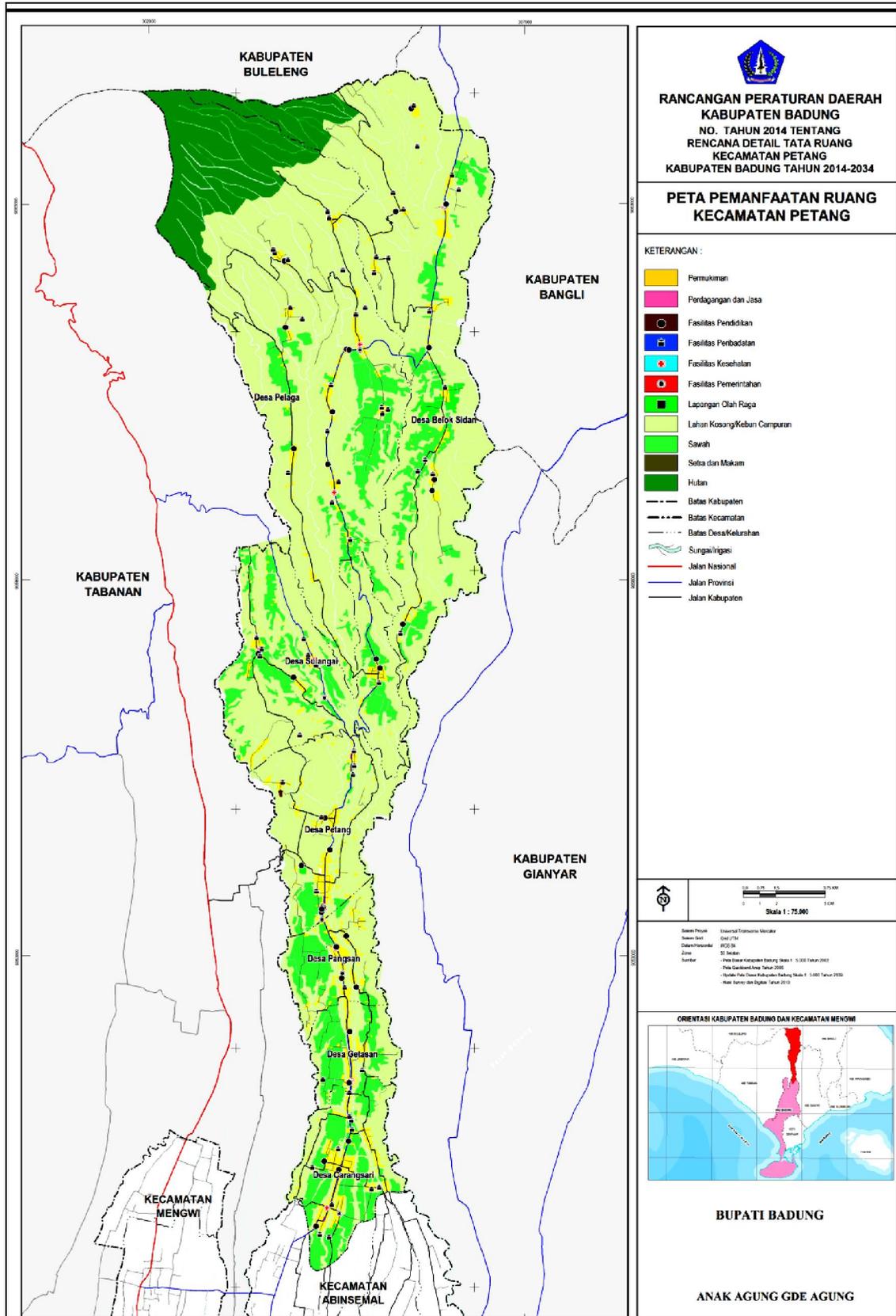
Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Cangu - Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan -Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Masalah Sampah		
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 		

2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah		
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).

Pengaruh kumulatif
<p>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</p>

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan,termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan /pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan kawasan industri khusus

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta	3. Mendorong kepatuhan/ke taatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah	1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan	Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3	Pengembangan Agropolitan	1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap	1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. penerapan	1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona	Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		<p>pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif</p>	<p>teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3.penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4.integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2.pengembangan pertanian organik</p>	<p>iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p>
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p>	<p>1.Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.</p>	<p>1.Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.</p>	<p>Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung</p>
5	Pengembangan Kawasan Industri	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p>	<p>1.penetapan kawasan industri khusus</p>	<p>Penetapan kawasan industry khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan</p>

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.		kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan :
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran :
 - 1) Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - 2) Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Tujuan :
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
Sasaran :
Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
- c. Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
Sasaran :
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Tujuan :
Menurunnya angka kemiskinan.
Sasaran :
Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- e. Tujuan :
Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas.
Sasaran :
Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	96%	97%	98%	99%
			b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	90%	91%	92%	93%	95%
		b. Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	92%	93%	94%	95%
			b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah <i>stakeholders</i> yang menyampaikan usulan kegiatan	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak
			b. Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	85%	85%	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	98%	99%
			b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	98%	99%
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	a. Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	85%	86%	87%	88%	90%
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Presentase Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	90%	91%	92%	93%	95%

4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

- 1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

b. Strategi :

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat).

c. Strategi :

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.
- 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah.
- 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan.
- 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).

d. Strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Badung
Tahun 2016 s.d 2021

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	95%	a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	
			b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD			
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Persentase usulan kegiatan yang diserap dalam RKPD	85%	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	Memberikan kesempatan yang proporsional kepada stakeholders dalam penyampaian aspirasinya	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	97%	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kerjanya 100% keatas	Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan <i>stakeholders</i>	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
4. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	2,05-2,00%	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
5. Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	100%	Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur dan Pengembangan wilayah	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- f. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Bappeda Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta						
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.829,51		14.144,48		15.639,12		15.520,76		17.529,93		75.663,80	Bappeda	Kabupaten Badung				
				01 FUNGSI PERENCANAAN			12.829,51		14.144,48		15.639,12		15.520,76		17.529,93		75.663,80	Bappeda	Kabupaten Badung					
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	887,01	100%	1.243,63	100%	1.322,48	100%	1.454,73	100%	1.600,20	100%	1.600,20	100%	6.508,06	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Kegiatan :																				
				08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	319,40	120 buku	409,16	146 Buku	464,57	146 Buku	511,03	146 Buku	562,13	730 buku	2.266,29	Bappeda	Kabupaten Badung			
				24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 kali	1 Dokumen	97,74	1 Dokumen	152,07	1 Dokumen	118,27	1 Dokumen	130,09	1 Dokumen	143,10	5 Dokumen	641,28	Bappeda	Kabupaten Badung			
				35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	165,76	120 buku	198,92	146 Buku	200,58	146 Buku	220,63	146 Buku	242,70	730 buku	1.028,59	Bappeda	Kabupaten Badung			
				41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	1 laporan	15,67	1 laporan	10,65	1 laporan	18,96	1 laporan	20,86	1 laporan	22,94	5 laporan	89,08	Bappeda	Kabupaten Badung			
				45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	71,07	1 Jenis Dokumen	157,21	1 Jenis Dokumen	172,93	1 Jenis Dokumen	190,22	1 Jenis Dokumen	209,24	5 Jenis Dokumen	800,66	Bappeda	Kabupaten Badung			
				46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	152,32	1 Jenis Dokumen	167,55	1 Jenis Dokumen	184,31	1 Jenis Dokumen	202,74	1 Jenis Dokumen	223,01	5 Jenis Dokumen	929,93	Bappeda	Kabupaten Badung			
				47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	47,72	1 Jenis Dokumen	115,45	1 Jenis Dokumen	127,00	1 Jenis Dokumen	139,69	1 Jenis Dokumen	153,66	5 Jenis Dokumen	583,52	Bappeda	Kabupaten Badung			
				48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	17,33	1 Jenis Dokumen	32,62	1 Jenis Dokumen	35,88	1 Jenis Dokumen	39,47	1 Jenis Dokumen	43,41	5 Jenis Dokumen	168,71	Bappeda	Kabupaten Badung			
				01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	75%	75%	1.979,16	75%	1.968,81	76%	2.121,77	77%	2.295,54	78%	2.492,18	80%	10.857,46	Bappeda	Kabupaten Badung			
				Kegiatan :																				
01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	3 jenis benda pos	3 jenis benda pos	8,22	3 jenis benda pos	8,22	3 jenis benda pos	9,04	3 jenis benda pos	9,95	3 jenis benda pos	10,94	3 jenis benda pos	46,37	Bappeda	Kabupaten Badung							
02	Penyediaan jasa komunikasi, daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	2 jenis jasa komunikasi	2 jenis jasa komunikasi	426,79	2 jenis jasa komunikasi	426,79	2 jenis jasa komunikasi	469,46	2 jenis jasa komunikasi	516,41	2 jenis jasa komunikasi	568,05	2 jenis jasa komunikasi	2.407,50	Bappeda	Kabupaten Badung							
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	37 Unit	36 Unit	21,10	36 Unit	18,10	36 Unit	19,91	36 Unit	21,90	36 Unit	24,09	36 Unit	105,10	Bappeda	Kabupaten Badung							
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	28 jenis alat tulis kantor	28 jenis alat tulis kantor	39,82	28 jenis alat tulis kantor	44,86	28 jenis alat tulis kantor	49,35	28 jenis alat tulis kantor	54,28	28 jenis alat tulis kantor	59,71	28 jenis alat tulis kantor	248,03	Bappeda	Kabupaten Badung							
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya pengadaan	35 jenis cetakan	35 jenis cetakan	104,40	35 jenis cetakan	101,86	35 jenis cetakan	112,04	35 jenis cetakan	123,25	35 jenis cetakan	135,57	35 jenis cetakan	577,12	Bappeda	Kabupaten Badung							
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	15,86	1 paket	15,17	1 paket	16,69	1 paket	18,36	1 paket	20,20	1 paket	86,28	Bappeda	Kabupaten Badung							
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga kantor	11 jenis alat RT	11 jenis alat RT	5,78	11 jenis alat RT	11,30	11 jenis alat RT	12,43	11 jenis alat RT	13,68	11 jenis alat RT	15,04	11 jenis alat RT	58,23	Bappeda	Kabupaten Badung							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	70.83	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79.11	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	87.02	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	95.72	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	105.30	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	437.98	Bappeda	Kabupaten Badung
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	9 jenis konsumsi	9 jenis konsumsi	33.00	9 jenis konsumsi	57.88	9 jenis konsumsi	63.66	9 jenis konsumsi	70.03	9 jenis konsumsi	77.03	9 jenis konsumsi	301.60	Bappeda	Kabupaten Badung
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah	1 Paket	1 Paket	600,00	1 Paket	600,00	1 Paket	660,00	1 Paket	726,00	1 Paket	798,60	1 Paket	3.384,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Tersedianya bahan/sarana lomba raga dan kesenian	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	17,50	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	53,50	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	58,85	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	64,74	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	71,21	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	265,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya bahan upakara keagamaan	13 jenis sarana upakara	13 jenis sarana upakara	28,85	13 jenis sarana upakara	31,40	13 jenis sarana upakara	34,54	13 jenis sarana upakara	37,99	13 jenis sarana upakara	41,79	13 jenis sarana upakara	174,57	Bappeda	Kabupaten Badung
				25	Pelaksanaan Upakara Pengantaran Pura-Pura Kahyanan Jagat	Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	2 pura	2 pura	40,00	2 pura	131,50	2 pura	144,65	2 pura	159,12	2 pura	175,03	2 pura	650,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				26	Penyediaan bahan dekorasi	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	-	-	-	6 jenis bahan dekorasi	5,00	-	-	-	-	6 jenis bahan dekorasi	5,50	6 jenis bahan dekorasi	10,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	30084 Liter	32181 Liter	337,49	34920 Liter	384,12	167436 liter	1.873,97	Bappeda	Kabupaten Badung						
				28	Pencelenggaraan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	-	1 paket	229,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	229,52	Bappeda	Kabupaten Badung
				02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1 paket	1.116,52	1 paket	1.105,93	1 paket	1.172,52	1 paket	1.289,77	1 paket	1.418,75	1 paket	6.103,48	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dinas/Operasional	-	1 unit	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	19,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				7	Pengadaan perlengkapan kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	-	9 jenis perlengkapan kantor	105,64	4 jenis perlengkapan kantor	40,00	-	-	-	-	-	-	9 jenis perlengkapan kantor	145,64	Bappeda	Kabupaten Badung
				09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	11 jenis peralatan kantor	11 jenis peralatan kantor	615,00	11 jenis peralatan kantor	646,04	11 jenis peralatan kantor	710,64	11 jenis peralatan kantor	781,71	11 jenis peralatan kantor	859,88	11 jenis peralatan kantor	3.613,27	Bappeda	Kabupaten Badung
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	3 jenis komponen gedung	3 jenis komponen gedung	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis komponen gedung	3,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	37 Unit	37 Unit	141,63	35 Unit	170,27	35 Unit	187,30	35 Unit	206,03	35 Unit	226,63	37 Unit	931,86	Bappeda	Kabupaten Badung
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan kantor	7 jenis pemeliharaan	7 jenis pemeliharaan	114,50	4 jenis pemeliharaan	124,86	4 jenis pemeliharaan	137,35	4 jenis pemeliharaan	151,09	4 jenis pemeliharaan	166,19	7 jenis pemeliharaan	693,99	Bappeda	Kabupaten Badung
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor	2 jenis pemeliharaan	2 jenis pemeliharaan	79,75	2 jenis pemeliharaan	79,75	2 jenis pemeliharaan	87,73	2 jenis pemeliharaan	96,50	2 jenis pemeliharaan	106,15	2 jenis pemeliharaan	449,87	Bappeda	Kabupaten Badung
				29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terpeliharanya Peralatan meubelair	4 jenis meubelair	4 jenis meubelair	25,00	4 jenis meubelair	25,00	4 jenis meubelair	27,50	4 jenis meubelair	30,25	4 jenis meubelair	33,28	4 jenis meubelair	141,03	Bappeda	Kabupaten Badung
				46	Pemeliharaan Tanaman Hias	tersedianya Tanaman Hias untuk di Lingkungan Bappeda Litbang Kab. Badung	10 jenis tanaman	10 jenis tanaman	12,00	10 jenis tanaman	20,00	10 jenis tanaman	22,00	10 jenis tanaman	24,20	10 jenis tanaman	26,62	10 jenis tanaman	104,82	Bappeda	Kabupaten Badung
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	485,52	12 bulan	710,65	12 bulan	781,72	12 bulan	859,89	12 bulan	945,88	12 bulan	3.783,66	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	29 Orang	29 Orang	479,74	29 Orang	617,32	29 Orang	679,06	29 Orang	746,96	29 Orang	821,66	145 Orang	3.344,74	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		02 Penvusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Tersusunnya AKIP Bappeda	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	5,78	4 Jenis Dokumen	93,33	4 Jenis Dokumen	102,66	4 Jenis Dokumen	112,93	4 Jenis Dokumen	124,22	20 Jenis Dokumen	438,92	Bappeda	Kabupaten Badung
				27 Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.019,11	23,64%	1.403,19	27,27%	836,77	30,91%	1.520,45	30,91%	5.270,96	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																
				01 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	1 paket	1 paket	241,44								1 paket	241,44	Bappeda	Kabupaten Badung	
				02 Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	400,00	1 paket	400,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
				05 Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	Terlaksananya Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	-	-	-	-	-	1 paket	1.097,03	-	-	-	1 paket	1.097,03	Bappeda	Kabupaten Badung	
				xx Penyusunan Materi Teknis peninjauan kembali RTRW	Tersusunnya Materi Teknis peninjauan kembali RTRW								1 paket	500,00		1 paket	500,00			
				xx Penyusunan RAPERDA RTRW	Tersusunnya RAPERDA RTRW										1 Paket	750,00	1 paket	750,00		
				06 Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung		1 paket	1 kajian	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				01 Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	-	-	-	1 Jenis Dokumen	162,14	1 Jenis Dokumen	178,36	1 Jenis Dokumen	196,19	1 Jenis Dokumen	215,81	4 Jenis Dokumen	752,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				03 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	-	-	-	1 laporan	116,18	1 laporan	127,80	1 laporan	140,58	1 laporan	154,64	1 laporan	539,19	Bappeda	Kabupaten Badung
				04 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di	-	-	-	1 paket	740,79	-	-	-	-	-	-	1 paket	740,79	Bappeda	Kabupaten Badung
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD		07 Program Perencanaan dan Pencanaan Peranokt Daerah	Persentase kesesuaian antara Renia SKPD dengan RKPD	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	966,14	100%	511,22	100%	187,34	100%	1.857,11	Bappeda	Kabupaten Badung
				01 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	10,12	3 Jenis Dokumen	9,27	3 Jenis Dokumen	10,20	3 Jenis Dokumen	11,22	3 Jenis Dokumen	12,34	3 Jenis Dokumen	53,16	Bappeda	Kabupaten Badung
				9 Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	Jumlah dokumen perubahan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	38 Dokumen	173,01	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	173,01	Bappeda	Kabupaten Badung	
				xx Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	175,00	38 Dokumen	175,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx Penyusunan Analisis Standar Biaya	Tersusunnya Analisis Standar Biaya						1 Paket	955,94	1 Paket	500,00		2 Paket	1.455,94	Bappeda	Kabupaten Badung	
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan	100%	100%	549,20	100%	536,12	100%	589,73	100%	648,70	100%	713,57	100%	3.037,31	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan kegiatan dalam Musrenbang b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	21	Kegiatan :	RPJMD																
				42 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	188,12	38 paket dokumen	209,02	38 paket dokumen	229,92	38 paket dokumen	252,92	38 paket dokumen	278,21	190 paket dokumen	1.158,18	Bappeda	Kabupaten Badung	
				43 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	361,08	38 paket dokumen	327,09	38 paket dokumen	359,80	38 paket dokumen	395,78	38 paket dokumen	435,36	190 paket dokumen	1.879,12	Bappeda	Kabupaten Badung	
				09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	200,98	120 buku	363,49	146 Buku	399,84	146 Buku	439,82	146 Buku	483,81	730 buku	1.887,94	Bappeda	Kabupaten Badung	
				19 Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	600 buku	600 buku	45,95	600 buku	58,55	600 buku	64,40	600 buku	70,84	600 buku	77,93	3000 buku	317,67	Bappeda	Kabupaten Badung	
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	15	Program Pengembangan Data/informasi	tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	127,37	1 paket	140,11	1 paket	154,12	1 paket	169,53	1 paket	1.009,42	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :																	
				05 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100 buku	100 buku	150,82	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	150,82	Bappeda	Kabupaten Badung	
				43 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	200 buku	100 buku	135,33									100 buku	135,33	Bappeda	Kabupaten Badung	
				44 Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah laporan data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 laporan	132,15	1 laporan	127,37	1 laporan	140,11	1 laporan	154,12	1 laporan	169,53	5 laporan	723,27	Bappeda	Kabupaten Badung	
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	100%	100%	4.544,40	100%	4.810,98	100%	4.843,56	100%	4.942,34	100%	5.701,57	100%	24.842,85	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :																	
				12 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	100 buku	50 buku	22,61	50 buku	20,61	50 buku	22,68	50 buku	24,94	50 buku	27,44	250 buku	118,28	Bappeda	Kabupaten Badung	
				62 Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	-	1 jenis Dokumen	500,62	-	-	1 jenis Dokumen	668,71	-	-	-	-	2 jenis Dokumen	1.169,33	Bappeda	Kabupaten Badung	
				39 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	200 buku	125 buku	220,77	125 buku	237,82	125 buku	261,61	125 buku	287,77	125 buku	316,54	625 buku	1.324,51	Bappeda	Kabupaten Badung	
				44 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	1 paket	-	4 jenis dokumen	211,86	4 jenis dokumen	233,05	4 jenis dokumen	256,35	4 jenis dokumen	281,98	16 jenis dokumen	983,24	Bappeda	Kabupaten Badung		
				51 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	7 SKPD	4 kali/tahun	150,06	4 kali/tahun	152,88	4 kali/tahun	168,16	4 kali/tahun	203,48	20 kali/tahun	859,56	Bappeda	Kabupaten Badung			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				52	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	50 buku	200 buku	153,04	200 buku	205,21	300 buku	227,26	300 buku	249,99	300 buku	274,99	1300 buku	1.110,48	Bappeda	Kabupaten Badung
				53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring Penggunaan Dana APBN di Kab. Badung	80 buku	80 buku	81,91	80 buku	145,61	80 buku	160,17	80 buku	176,19	80 buku	193,80	80 buku	757,68	Bappeda	Kabupaten Badung
				61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	-	1 Jenis Dokumen	141,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenis Dokumen	141,38	Bappeda	Kabupaten Badung
				31	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	5 buku laporan	12,36	5 buku laporan	16,12	5 buku laporan	17,73	5 buku laporan	19,50	5 buku laporan	21,45	25 buku laporan	87,15	Bappeda	Kabupaten Badung
				64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan	2.465,45	2 Laporan	2.641,17	2 Laporan	2.905,29	2 Laporan	3.195,82	2 Laporan	3.515,40	10 Laporan	14.723,14	Bappeda	Kabupaten Badung
				65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan (Renja dan RKPD)	-	2 Jenis Dokumen	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis Dokumen	22,31	Bappeda	Kabupaten Badung
				66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	213,84	1 Laporan	213,84	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	213,84	Bappeda	Kabupaten Badung
				69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	-	1 Laporan	45,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	45,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	196,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	196,85	Bappeda	Kabupaten Badung
				71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	-	1 Laporan	40,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	40,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				72	SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	662,87	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	662,87	Bappeda	Kabupaten Badung
				74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	-	-	-	4 kali/tahun	106,40	4 kali/tahun	117,04	4 kali/tahun	128,74	4 kali/tahun	141,61	16 kali/tahun	493,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1 Laporan	19,76	1 Laporan	21,74	1 Laporan	23,91	1 Laporan	26,30	4 Laporan	91,71	Bappeda	Kabupaten Badung
				78	Pengelela Teknis dan Pemutahiran SIPD	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	140,34	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	140,34	Bappeda	Kabupaten Badung
				83	Workshop SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Laporan	275,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	275,38	Bappeda	Kabupaten Badung
				87	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Aplikasi	216,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	216,08	Bappeda	Kabupaten Badung
				79	Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	2 Laporan	36,49	2 Laporan	40,14	2 Laporan	44,15	2 Laporan	48,57	10 Laporan	169,35	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				xx	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	650,00	-	1 jenis Dokumen	650,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	442,35	6 Kecamatan	486,59	6 Kecamatan	535,25	6 Kecamatan	2.113,37	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Keegiatannya	5 SKPD/ 2 bagian	9 PD & 3 Bagian	107,08	8 PD & 3 Bagian	198,36	9 PD & 3 Bagian	218,20	9 PD & 3 Bagian	240,02	9 PD & 3 Bagian	264,02	9 PD & 3 Bagian	1.027,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan	-	3 Perangkat Daerah	73,69	3 Perangkat Daerah	129,59	3 Perangkat Daerah	142,55	3 Perangkat Daerah	156,80	3 Perangkat Daerah	172,48	3 Perangkat Daerah	675,11	Bappeda	Kabupaten Badung
				18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pengembangan Dunia Usaha	-	2 Perangkat Daerah	66,27	2 Perangkat Daerah	74,19	2 Perangkat Daerah	81,61	2 Perangkat Daerah	89,77	2 Perangkat Daerah	98,75	2 Perangkat Daerah	410,59	Bappeda	Kabupaten Badung
				24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	0,00	4 paket	613,61	3 paket	98,99	3 paket	108,89	2 paket	119,78	15 paket	941,27	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				04	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	-	-	-	10 buku	45,00	10 buku	49,50	10 buku	54,45	10 buku	59,89	10 buku	208,83	Bappeda	Kabupaten Badung
				06	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	-	-	-	-	58,01	-	-	-	-	-	-	1 Paket	58,01	Bappeda	Kabupaten Badung
				07	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	10 buku	45,00	10 buku	49,50	10 buku	49,50	10 buku	54,45	10 buku	59,89	40 buku	208,83	Bappeda	Kabupaten Badung
				06	Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1 paket	465,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	465,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
					Pelatihan Penyeragaman Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pusat	Jumlah Aparat Perencanaan Pembangunan yang mendapat bimtek	-	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda	Kabupaten Badung
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	678,66	100%	555,90	100%	611,49	100%	672,64	100%	739,90	100%	3.258,60	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	-	4kali/tahun	126,42	4kali/tahun	365,07	4kali/tahun	401,57	4kali/tahun	441,73	4kali/tahun	485,90	4kali/tahun	1.820,68	Bappeda	Kabupaten Badung
				65	Pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	-	1 Aplikasi	552,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	552,25	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi						
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta								
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
5	Terwujudnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	-	-	-	1 Laporan	190,84	1 Laporan	209,92	1 Laporan	230,91	1 Laporan	254,00	4 Laporan	885,67	Bappeda	Kabupaten Badung					
							1 paket	1 paket	303,64	4 paket	251,42	3 paket	276,56	3 paket	304,22	2 paket	334,64	15 paket	1.470,47	Bappeda	Kabupaten Badung					
							Kegiatan :																			
							01	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan wilayah	-	3 kali/tahun	132,18	-	-	-	-	3 kali/tahun	132,18	Bappeda	Kabupaten						
							02	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	3 kali/tahun	94,12	4 kali/tahun	94,78	4 kali/tahun	104,26	4 kali/tahun	114,69	4 kali/tahun	126,15	19 kali/tahun	534,01	Bappeda	Kabupaten Badung		
05	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	-	4 kali/tahun	77,33	4 kali/tahun	156,64	4 kali/tahun	172,30	4 kali/tahun	189,53	4 kali/tahun	208,48	20 kali/tahun	804,28	Bappeda	Kabupaten Badung									
27	Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%						20,00%	177,49	23,64%	195,24	27,27%	214,77	30,91%	236,24	30,91%	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung						
			Kegiatan :																							
02	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	-	-	-	4 kali/tahun	177,49	4 kali/tahun	195,24	4 kali/tahun	214,77	4 kali/tahun	236,24	4 kali/tahun	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung									

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016
Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	940,37	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :						
				08	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung	160 Buku	376,72	Bappeda	Kabupaten Badung
				24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Usulan program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang diavai APBN	1 kali	48,23	Bappeda	Kabupaten Badung
				35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung	160 Buku	128,28	Bappeda	Kabupaten Badung
				41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	14,52	Bappeda	Kabupaten Badung
				45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD	165 buku	115,66	Bappeda	Kabupaten Badung
				46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	165 buku	173,96	Bappeda	Kabupaten Badung
				47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	165 buku	37,87	Bappeda	Kabupaten Badung
48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD	165 buku	45,14	Bappeda	Kabupaten Badung				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 paket	1.037,17	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				01 Pelayanan jasa administrasi keuangan		3 jenis benda pos	8,22	Bappeda	Kabupaten Badung
				02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2 jenis jasa komunikasi	62,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		37 Unit	18,80	Bappeda	Kabupaten Badung
				10 Penyediaan alat tulis kantor		28 jenis alat tulis kantor	32,07	Bappeda	Kabupaten Badung
				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35 jenis cetakan	130,29	Bappeda	Kabupaten Badung
				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	6,51	Bappeda	Kabupaten Badung
				14 Penyediaan peralatan rumah tangga		11 jenis alat RT	14,28	Bappeda	Kabupaten Badung
				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10 Jenis Surat Kabar/Majalah	59,74	Bappeda	Kabupaten Badung
				17 Penyediaan makanan dan minuman		9 jenis konsumsi	25,99	Bappeda	Kabupaten Badung
				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Paket	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				19 Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah		2 jenis lomba (olahraga dan seni)	14,97	Bappeda	Kabupaten Badung
				24 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan		13 jenis sarana upakara	34,85	Bappeda	Kabupaten Badung
				25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyanan Jaat		2 pura	40,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				27 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan		30084 Liter	339,46	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1.106,62	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	230,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor		9 jenis perlengkapan kantor	345,41	Bappeda	Kabupaten Badung
				10 Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair		1 paket	201,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3 jenis komponen gedung	2,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		37 Unit	182,63	Bappeda	Kabupaten Badung
				26 Pemeliharaan perlengkapan kantor		7 jenis pemeliharaan	77,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				28 Pemeliharaan peralatan kantor		2 jenis pemeliharaan	30,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		4 jenis pemeliharaan	25,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				46 Pemeliharaan Tanaman Hias		10 jenis tanaman	12,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	355,98	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		29 Orang	351,04	Bappeda	Kabupaten Badung
				03 Survey Kepuasan Masyarakat		12 Bulan	4,94	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	6,25	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah		30 buku	6,25	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		18 Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan		438,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				56 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RDTR Desa Wisata di Kabupaten Badung		1 paket	192,30	Bappeda	Kabupaten Badung
				57 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTBL Kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan		1 Paket	115,80	Bappeda	Kabupaten Badung
				58 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu		1 Paket	130,50	Bappeda	Kabupaten Badung
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD		09 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	1 paket	31,32	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD		Kegiatan :					
				01 Penyusunan Dokumen Rencana SKPD		3 paket	9,65	Bappeda	Kabupaten Badung
				02 Verifikasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021		1 paket	21,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	479,81	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				42 Penelitian RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016		53 set	171,72	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam <i>perencanaan pembangunan</i> daerah	a. Jumlah <i>stakeholders</i> yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	18	43 Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2017	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	53 set	308,09	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Program Perencanaan Tata Ruang		875,75	Bappeda	Kabupaten Badung		
				Kegiatan :						
				29 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kab. Badung melalui BKPRD		1 paket	375,75	Bappeda	Kabupaten Badung	
				55 Ortorektifikasi Peta Dasar Pendukung RDTR Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang		1 paket	500,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1 paket	424,96	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :						
				09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung		160 Buku	271,09	Bappeda	Kabupaten Badung	
				19 Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan		600 buku	34,04	Bappeda	Kabupaten Badung	
				26 Penyelenggaraan Forum SKPD		80 Buku	119,84	Bappeda	Kabupaten Badung	
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kerjanya 100% keatas	15	Program Pengembangan Data/informasi		1 paket	963,98	Bappeda	Kabupaten Badung	
				Tersedianya data dan informasi yang valid						
				05 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	100 buku	98,97	Bappeda	Kabupaten Badung		
				43 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	1 paket	125,33	Bappeda	Kabupaten Badung		
				44 Pembangunan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung		349,28	Bappeda	Kabupaten Badung		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				xx Pembuatan Dokumentasi Visual RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021			199,60	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx Pembuatan Dokumentasi Visual Profil dan Potensi Daerah			190,80	Bappeda	Kabupaten Badung
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	1 paket	2.137,36	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				12 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung		100 buku	22,61	Bappeda	Kabupaten Badung
				29 Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021		211 buku	1.151,56	Bappeda	Kabupaten Badung
				33 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanqqulandan Kemiskinan Daerah		6 Kali	132,27	Bappeda	Kabupaten Badung
				39 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		200 buku	225,47	Bappeda	Kabupaten Badung
				51 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial		7 SKPD	129,70	Bappeda	Kabupaten Badung
				52 Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD Kabupaten Badung		200 buku	141,35	Bappeda	Kabupaten Badung
				53 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung		80 buku	81,91	Bappeda	Kabupaten Badung
				56 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang statistik, monitoring dan evaluasi		750 buku	146,65	Bappeda	Kabupaten Badung
				58 Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Paket	59,46	Bappeda	Kabupaten Badung
				60 Pemutakhiran e-Musrenbang		1 Paket	46,37	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	394,47	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		5 SKPD/ 2 bagian	11,61	Bappeda	Kabupaten Badung
				15 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah		2 kali	360,21	Bappeda	Kabupaten Badung
				17 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian		6 kali	12,47	Bappeda	Kabupaten Badung
				18 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha di Kabupaten Badung			10,17	Bappeda	Kabupaten Badung
				24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	145,24	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :					
				01 Koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah		1 Paket	145,24	Bappeda	Kabupaten Badung

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Bappeda Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi																			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta																					
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	3	01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	100%	9.248,32	-	10.359,10	-	11.563,10	-	11.075,56	-	12.673,12	-	54.919,21	Bappeda	Kabupaten Badung																			
					FUNGSI PERENCANAAN																9.248,32	10.359,10	11.563,10	11.075,56	12.673,12	54.919,21	Bappeda	Kabupaten Badung											
					21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah																887,01	1.243,63	100%	1.322,48	100%	1.454,73	1.600,20	100%	6.508,06	Bappeda	Kabupaten Badung								
					Kegiatan :																																		
					08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah																160 Buku	146 Buku	319,40	120 buku	409,16	146 Buku	464,57	146 Buku	511,03	146 Buku	562,13	730 buku	2.266,29	Bappeda	Kabupaten Badung				
					24 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP																1 kali	1 Dokumen	97,74	1 Dokumen	152,07	1 Dokumen	118,27	1 Dokumen	130,09	1 Dokumen	143,10	5 Dokumen	641,28	Bappeda	Kabupaten Badung				
					35 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung																160 Buku	146 Buku	165,76	120 buku	198,92	146 Buku	200,58	146 Buku	220,63	146 Buku	242,70	730 buku	1.028,59	Bappeda	Kabupaten Badung				
					41 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik																1 laporan	1 laporan	15,67	1 laporan	10,65	1 laporan	18,96	1 laporan	20,86	1 laporan	22,94	5 laporan	89,08	Bappeda	Kabupaten Badung				
					45 Penyusunan Kebijakan Umum APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	71,07	1 Jenis Dokumen	157,21	1 Jenis Dokumen	172,93	1 Jenis Dokumen	190,22	1 Jenis Dokumen	209,24	5 Jenis Dokumen	800,66	Bappeda	Kabupaten Badung				
					46 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	152,32	1 Jenis Dokumen	167,55	1 Jenis Dokumen	184,31	1 Jenis Dokumen	202,74	1 Jenis Dokumen	223,01	5 Jenis Dokumen	929,93	Bappeda	Kabupaten Badung				
					47 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	47,72	1 Jenis Dokumen	115,45	1 Jenis Dokumen	127,00	1 Jenis Dokumen	139,69	1 Jenis Dokumen	153,66	5 Jenis Dokumen	583,52	Bappeda	Kabupaten Badung				
					48 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD																1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	17,33	1 Jenis Dokumen	32,62	1 Jenis Dokumen	35,88	1 Jenis Dokumen	39,47	1 Jenis Dokumen	43,41	5 Jenis Dokumen	168,71	Bappeda	Kabupaten Badung				
																						b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang		27 Program Perencanaan Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.019,11	23,64%	1.403,19	27,27%	836,77	30,91%	1.520,45	30,91%	5.270,96	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan :																																			
				01 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	1 paket	1 paket	241,44								1 paket	241,44	Bappeda	Kabupaten Badung																				
				02 Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	400,00	1 paket	400,00	Bappeda	Kabupaten Badung																			
				05 Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	Terlaksananya Penyusunan dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	-	-	-	-	-	1 paket	1.097,03	-	-	-	1 paket	1.097,03	Bappeda	Kabupaten Badung																				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				xx Penyusunan Materi Teknis peninjauan kembali RTRW	Tersusunnya Materi Teknis peninjauan kembali RTRW								1 paket	500,00			1 paket	500,00		
				xx Penyusunan RAPERDA RTRW	Tersusunnya RAPERDA RTRW										1 Paket	750,00	1 paket	750,00		
				06 Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung		1 paket	1 kajian	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	250,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				01 Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	-	-	-	1 Jenis Dokumen	162,14	1 Jenis Dokumen	178,36	1 Jenis Dokumen	196,19	1 Jenis Dokumen	215,81	4 Jenis Dokumen	752,50	Bappeda	Kabupaten Badung
				03 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	-	-	-	1 laporan	116,18	1 laporan	127,80	1 laporan	140,58	1 laporan	154,64	1 laporan	539,19	Bappeda	Kabupaten Badung
				04 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	-	-	-	1 paket	740,79	-	-	-	-	-	-	1 paket	740,79	Bappeda	Kabupaten Badung
	b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD		07 Program Perencanaan dan Peningkatan Perangkat Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKP	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	966,14	100%	511,22	100%	187,34	100%	1.857,11	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKP		01 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	10,12	3 Jenis Dokumen	9,27	3 Jenis	10,20	3 Jenis	11,22	3 Jenis	12,34	3 Jenis	53,16	Bappeda	Kabupaten Badung
				9 Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	Jumlah dokumen perubahan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	38 Dokumen	173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	173,01	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Dokumen	175,00	38 Dokumen	175,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx Penyusunan Analisis Standar Biaya	Tersusunnya Analisis Standar Biaya						1 Paket	955,94	1 Paket	500,00			2 Paket	1.455,94		
				21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKP dengan RPJMD	100%	100%	549,20	100%	536,12	100%	589,73	100%	648,70	100%	713,57	100%	3.037,31	Bappeda	Kabupaten Badung
				42 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	188,12	38 paket dokumen	209,02	38 paket	229,92	38 paket	252,92	38 paket	278,21	190 paket	1.158,18	Bappeda	Kabupaten Badung
				43 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD yang telah dibahas	53 set	38 paket dokumen	361,08	38 paket dokumen	327,09	38 paket	359,80	38 paket	395,78	38 paket	435,36	190 paket	1.879,12	Bappeda	Kabupaten Badung
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan kegiatan		21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Persentase kesesuaian antara RKP dengan RPJMD	100%	100%	349,70	100%	612,06	100%	673,26	100%	740,59	100%	814,65	100%	3.190,25	Bappeda	Kabupaten Badung
		b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang		09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten Badung	160 Buku	146 Buku	200,98	120 buku	363,49	146 Buku	399,84	146 Buku	439,82	146 Buku	483,81	730 buku	1.887,94	Bappeda	Kabupaten Badung
				19 Penyelenggaraan Dokumen Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan	600 buku	600 buku	45,95	600 buku	58,55	600 buku	64,40	600 buku	70,84	600 buku	77,93	3000 buku	317,67	Bappeda	Kabupaten Badung
				26 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 Buku	80 Buku	102,77	80 Buku	190,02	80 Buku	209,02	80 Buku	229,92	80 Buku	252,91	400 buku	984,64	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta						
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas		15 Program Pengembangan Data/informasi	tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	127,37	1 paket	140,11	1 paket	154,12	1 paket	169,53	1 paket	1.009,42	Bappeda	Kabupaten Badung				
				Kegiatan :																				
				05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100 buku	100 buku	150,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 buku	150,82	Bappeda	Kabupaten Badung	
				43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	200 buku	100 buku	135,33											100 buku	135,33	Bappeda	Kabupaten Badung	
				44	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah laporan data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 laporan	132,15	1 laporan	127,37	1 laporan	140,11	1 laporan	154,12	1 laporan	169,53	5 laporan	723,27			Bappeda	Kabupaten Badung	
				21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	4.544,40	100%	4.810,98	100%	4.843,56	100%	4.942,34	100%	5.701,57	100%	24.842,85			Bappeda	Kabupaten Badung	
				Kegiatan :																				
				12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	100 buku	50 buku	22,61	50 buku	20,61	50 buku	22,68	50 buku	24,94	50 buku	27,44	250 buku	118,28			Bappeda	Kabupaten Badung	
				62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	-	1 jenis Dokumen	500,62	-	-	1 jenis Dokumen	668,71	-	-	-	-	2 jenis Dokumen	1.169,33			Bappeda	Kabupaten Badung	
				39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	200 buku	125 buku	220,77	125 buku	237,82	125 buku	261,61	125 buku	287,77	125 buku	316,54	625 buku	1.324,51			Bappeda	Kabupaten Badung	
				44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	1 paket	4 jenis dokumen	211,86	4 jenis dokumen	233,05	4 jenis dokumen	256,35	4 jenis dokumen	281,98	16 jenis dokumen	983,24					Bappeda	Kabupaten Badung	
				51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	7 SKPD	4 kali/tahun	150,06	4 kali/tahun	152,88	4 kali/tahun	168,16	4 kali/tahun	184,98	4 kali/tahun	203,48	20 kali/tahun	859,56			Bappeda	Kabupaten Badung	
				52	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	50 buku	200 buku	153,04	200 buku	205,21	300 buku	227,26	300 buku	249,99	300 buku	274,99	1300 buku	1.110,48			Bappeda	Kabupaten Badung	
53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan hasil Monitoring Penggunaan Dana APBN di Kab. Badung	80 buku	80 buku	81,91	80 buku	145,61	80 buku	160,17	80 buku	176,19	80 buku	193,80	80 buku	757,68			Bappeda	Kabupaten Badung					
61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	-	1 Jenis Dokumen	141,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenis Dokumen	141,38			Bappeda	Kabupaten Badung					
31	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	5 buku laporan	12,36	5 buku laporan	16,12	5 buku laporan	17,73	5 buku laporan	19,50	5 buku laporan	21,45	25 buku laporan	87,15			Bappeda	Kabupaten Badung					
64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan	2.465,45	2 Laporan	2.641,17	2 Laporan	2.905,29	2 Laporan	3.195,82	2 Laporan	3.515,40	10 Laporan	14.723,14			Bappeda	Kabupaten Badung					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan (Renja dan RKPD)	-	2 Jenis Dokumen	22,31							-	2 Jenis Dokumen	22,31	Bappeda	Kabupaten Badung	
				66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-		1 Laporan	213,84	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	213,84	Bappeda	Kabupaten Badung	
				69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	-	1 Laporan	45,30	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	45,30	Bappeda	Kabupaten Badung	
				70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	196,85	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	196,85	Bappeda	Kabupaten Badung	
				71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	-	1 Laporan	40,29	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	40,29	Bappeda	Kabupaten Badung	
				72	SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	662,87	-	-	-	-	-	1 Laporan	662,87	Bappeda	Kabupaten Badung	
				74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	-	-	-	4 kali/tahun	106,40	4 kali/tahun	117,04	4 kali/tahun	128,74	4 kali/tahun	141,61	16 kali/tahun	493,79	Bappeda	Kabupaten Badung
				77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1 Laporan	19,76	1 Laporan	21,74	1 Laporan	23,91	1 Laporan	26,30	4 Laporan	91,71	Bappeda	Kabupaten Badung
				78	Penyelenggara Teknis dan Pemutakhiran SIPD	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	1 Laporan	140,34	-	-	-	-	-	1 Laporan	140,34	Bappeda	Kabupaten Badung	
				83	Workshop SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Laporan	275,38	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	275,38	Bappeda	Kabupaten Badung	
				87	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Aplikasi	216,08	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	216,08	Bappeda	Kabupaten Badung	
				79	Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	2 Laporan	36,49	2 Laporan	40,14	2 Laporan	44,15	2 Laporan	48,57	10 Laporan	169,35	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	-	-	1 jenis Dokumen	350,00	Bappeda	Kabupaten Badung
				xx	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis Dokumen	650,00	1 jenis Dokumen	650,00	Bappeda	Kabupaten Badung	
				22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	442,35	6 Kecamatan	486,59	6 Kecamatan	535,25	6 Kecamatan	2.113,37	Bappeda	Kabupaten Badung
					Kegiatan :																
				04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikordinasikan Program dan Kegiatannya	5 SKPD/ 2 bagian	9 PD & 3 Bagian	107,08	8 PD & 3 Bagian	198,36	9 PD & 3 Bagian	218,20	9 PD & 3 Bagian	240,02	9 PD & 3 Bagian	264,02	9 PD & 3 Bagian	1.027,67	Bappeda	Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				02 Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	3 kali/tahun	94,12	4 kali/tahun	94,78	4 kali/tahun	104,26	4 kali/tahun	114,69	4 kali/tahun	126,15	19 kali/tahun	534,01	Bappeda	Kabupaten Badung
				05 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	-	4kali/tahun	77,33	4kali/tahun	156,64	4kali/tahun	172,30	4kali/tahun	189,53	4kali/tahun	208,48	20kali/tahun	804,28	Bappeda	Kabupaten Badung
				27 Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%			20,00%	177,49	23,64%	195,24	27,27%	214,77	30,91%	236,24	30,91%	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung
				Kegiatan : 02 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	-	-	-	4 kali/tahun	177,49	4 kali/tahun	195,24	4 kali/tahun	214,77	4 kali/tahun	236,24	4 kali/tahun	823,74	Bappeda	Kabupaten Badung

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
2	Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	80%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
3	Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
4	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah <i>stakeholders</i> yang menyampaikan usulan kegiatan	53 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak	49 pihak
6	Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
7	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	97%	98%	99%	99%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
8	Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	97%	97%	97%	97%	98%	99%	99%
9	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	-	85%	86%	87%	88%	90%	90%
10	Presentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	-	90%	91%	92%	93%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG,

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670127 199201 1 001